

TAHUN

20

19



DINAS PERHUBUNGAN

—



www.dishub.tanjabarkab.go.id



(0742) 7351069



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penyusunan LKIP merupakan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan laporan tahunan yang dibuat setiap akhir tahun dan sebagai bahan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Gambaran Pelayanan SKPD	3
1.3.1 Visi Misi dan OPD	4
1.3.2 Strategi dan Kebijakan Struktur	4
1.3.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
1.4 Sumber Daya SKPD	20
1.5 Analisis SWOT	24
1.6 Sistematika Pelaporan	26
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	29
2.1.1 Relevansi RPJMD dan Sasaran OPD	30
2.1.2 Strategi dan Kebijakan OPD	38
2.1.3 Tujuan dan Sasaran OPD	40
2.2 Perjanjian Kinerja	43
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2018 dan 2019	48
1. Sasaran Strategis 1	
Meningkatnya (PAD) pada sector transportasi darat, laut, sungai, danau dan penyeberangan	49
2. Sasaran Strategis 2	
Menurunnya tingkat kecelakaan darat dan laut	50
3. Sasaran Strategis 3	
Meningkatnya tertib laik angkutan jalan kendaraan angkutan umum	51
3.2 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah	53
a. Pendapatan Daerah	53
b. Pengelolaan Belanja Daerah	54
c. Permasalahan dan Solusi Pemecahan Masalah	57
Bab IV PENUTUP	62
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.....	20
Tabel 1.2	Aset pendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada dinas perhubungan	21
Tabel 2.1	Visi & Misi RPJMD	30
Tabel 2.2	Matriks Relevansi Renstra Dinas Perhubungan Terhadap Visi & Misi RPJMD	31
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja terhadap kondisi akhir renstra	41
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019	23
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019 dan perbandingan tahun 2018	25
Tabel 3.2	Realisasi Program, Kegiatan, Anggaran dan Capaian Tahun 2019 Dinas perhubungan kab. Tanjung jabung barat	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 63 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas perhubungan, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya memenuhi tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Perhubungan ditahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Perhubungan terus berusaha memperbaiki sistem penataan transportasi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Transportasi sendiri merupakan faktor utama yang menjadi sarana penghubung untuk mendukung berkembangnya kemajuan ekonomi, sosial dan demokrasi.

Pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.050.522.220,-** Realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.951.034.780,-** atau **97,72%** dan realisasi fisik **100%**. dengan melaksanakan **7 Program** dan **24 Kegiatan**.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 telah terlaksana dengan sangat baik dan sangat efisien.

Permasalahan yang mempengaruhi tercapainya target IKU Dinas Perhubungan akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, yaitu masih terdapat backlog antara target dan capaian kinerja untuk beberapa indikator kinerja dikarenakan adanya perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Dinas Perhubungan, misalnya perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran per kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan perwujudan visi Bupati pada





sektor transportasi maupun dukungan manajemen tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk meminimalisir permasalahan di masa mendatang, Dinas Perhubungan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan memenuhi target yang telah ditetapkan;
2. Menyusun dokumen perencanaan yang selaras;
3. Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, misalnya: melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak;
4. Melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian Indikator Kinerja Utama;
5. Melakukan penyempurnaan IKU yang bersifat outcome sampai dengan level Eselon II, dan selaras antara unit kerja dengan unit kerja di bawahnya;
6. Setiap unit Eselon II dan III aktif dalam melakukan bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun kelengkapan data, baik yang bersifat manual maupun online sehingga unit kerja di bawahnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama;
7. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja secara berkesinambungan yang dilakukan setiap Triwulan guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* oleh karena itu agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. *Good governance* yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral tinggi . Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Pertanggung jawaban tersebut tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keseluruhan aspek yang dijelaskan di atas merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah. integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan





memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah selaku penyelenggara negara, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di daerah yang berisi tentang informasi keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.





5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 12).

1.3 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Semangat reformasi menghendaki adanya penataan kembali sistem pemerintah baik dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah, baik di lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Masyarakat menghendaki adanya Penyelenggaraan Pemerintah yang lebih efektif, efisien, demokrasi, transparan, dan reponsif. Untuk menjawab tantangan diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan sebagian kewenangan dan tugas didasarkan pada Visi dan Misi yang ada pada Rencana





Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 :

1.3.1 VISI MISI DAN TUJUAN OPD

Visi :

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sejalan dengan Visi Bupati Tanjung Jabung Barat, Visi Dinas Perhubungan adalah :

“Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat”.

Misi :

Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/ produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas

1.3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.





Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 - 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan





keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.

4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.





5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

Selanjutnya dari kebijakan sektor tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan sub sektor sebagai berikut:

Bidang Perhubungan Darat.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kesadaran tertib lalu lintas kepada pengemudi kendaraan umum dan pengguna jalan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transportasi jalan yang menyeluruh baik dipedesaan, dalam kota, antar kota dalam provinsi dan luar kota antar provinsi, dalam rangka mewujudkan terciptanya kelancaran arus penumpang dan pendistribusian barang.
- Pengembangan dan peningkatan kinerja fasilitas angkutan umum, demi terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, teratur, andal dan terjangkau.
- Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban angkutan barang di jalan melalui optimalisasi pengoperasian jembatan timbang dan pembangunan jembatan timbang baru yang representatif dan memenuhi standar.
- Terciptanya optimalisasi peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana transportasi darat dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- Meningkatkan kemampuan SDM, pemantapan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar instansi.
- Mengoptimalkan Forum LLAJ dan optimalisasi peran dalam rangka mewujudkan system transportasi yang ideal.





Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

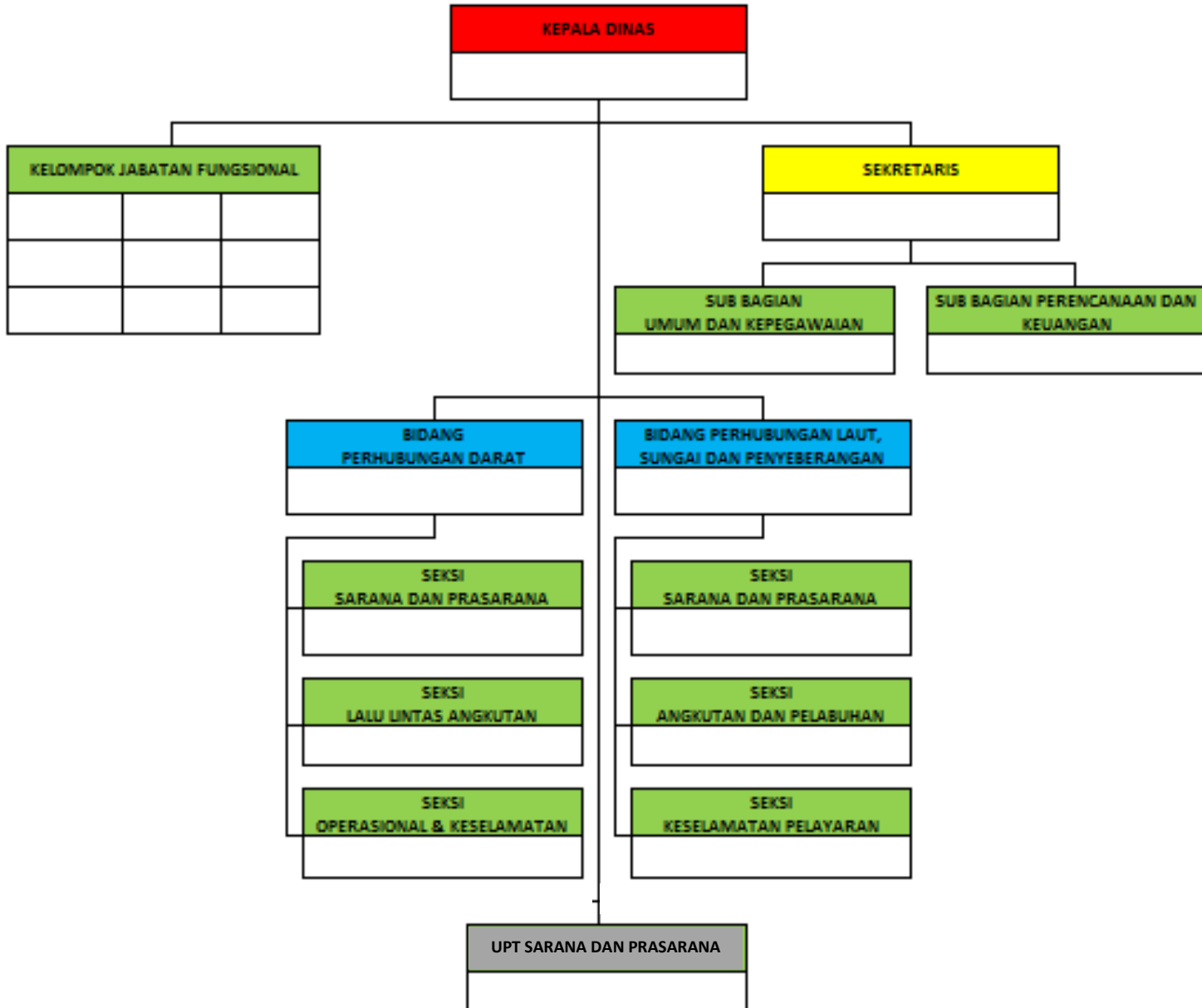
- Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Kuala Tungkal untuk melayani arus bongkar/muat dan ekspor/impur, sehingga memenuhi persyaratan sebagai outlet.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam menembus keterisolasian, melalui rehabilitasi dermaga sungai, pemasangan rambu sungai dan pembangunan fasilitas keselamatan sarana dan prasarana guna menunjang keselamatan pelayaran.
- Peningkatan maupun kuantitas sarana, prasarana dan operasional pelabuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas
- Pengembangan prasarana dan sarana angkutan penyeberangan sebagai angkutan antar pulau dalam rangka mendukung program pembangunan Kota Kuala Tungkal sebagai salah satu pintu gerbang Provinsi Jambi.
- Fasilitas upaya pengembangan dan optimalisasi pemberdayaan pelabuhan – pelabuhan dalam rangkaantisipasi terhadap tuntutan kerjasama
- kualitas regional dan era globalisasi.
- Fasilitas peningkatan kualitas dan kuantitas sarana bantu navigasi sebagai prasarana terpenuhinya standar keselamatan pelayaran.
- Koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya dukung pelayanan kesyahbandaran.
- Fasilitasi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daya dukung pelayanan keselamatan pelayaran.
- Penataan dan relokasi pelabuhan.
- Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut, sungai dan penyeberangan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing – masing.





GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.3.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten





Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Perhubungan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Dinas perhubungan disebut pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas dilingkungan dinas;
 - b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan dinas;
 - c. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelayanan teknis dinas;
 - d. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengn instansi terkait dalam pelaksanaannya.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat mengacu Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63); terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
 - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat;
 - Seksi Lalu Lintas Jalan dan Angkutan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Operasional dan Keselamatan;
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Danau dan Penyeberangan;





- Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - Seksi Angkutan Kepelabuhan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;





- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;





- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan darat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD lingkup perhubungan darat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.





5) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan teknis, menyusun rekomendasi, persyaratan, penetapan lokasi, pengadaan, pemeliharaan, pemasangan perlengkapan jalan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanteknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. melakukan penyiapan penetapan lokasi terminal dan persyaratan pengesahan pengoperasian terminal penumpang tipe c, bahan persyaratan pengesahan pembangunan terminal angkutan barang, serta proses pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- d. melakukan penyusunan bahan rekomendasi penetapankelas jalan dan jaringan jalan kabupaten;
- e. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- f. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten, dan rekomendasi persyaratan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan perbengkelan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kawasan, rencana induk jaringan LLAJ, jaringan trayek, jaringan lintas, pemberian rekomendasi, fasilitasi penyediaan





angkutan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam kabupaten, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, dan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan/pedesaan;
- d. melakukan fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- e. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan/pedesaan, rekomendasi izin trayek angkutan umum, AKDP dan AKAP, dan rekomendasi izin penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan rencana induk perkeretaapian dalam wilayah Daerah, rekomendasi penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya terletak di dalam wilayah Daerah dan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah serta rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah Daerah;
- g. melakukan penyiapan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

7) Seksi Operasi dan Keselamatan

Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencegahan, pengujian,





rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup operasi dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan angkutan khusus serta izin trayek angkutan kota/pedesaan;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan data analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), bahan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala (keur) kendaraan bermotor dan penertiban serta penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
- e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Daerah;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta pemanduan rute untuk pejabat dan/atau tamu daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

8) **BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN**

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;





- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pelabuhan sungai dan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- c. penetapan standar batas maksimum sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar);
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT lingkup perhubungan laut, sungai dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pemeriksaan, pelaporan, koordinasi, pemeliharaan, pengawasan, pemberian rekomendasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan laut sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan nya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengukuran, pemeriksaan terhadap konstruksi dan permesinan kapal;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan izin lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, baha pertimbangan teknis penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan sungai dan menyiapka rancang bangun fasilitas pelabuhan sungai lokal;





- d. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) perusahaan angkutan laut dan sungai dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner);
- e. melakukan koordinasi, pemeliharaan dan pengawasan untuk penetapan pemasangan rambu-rambu;
- f. melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, dan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan memberikan rekomendasi teknis kegiatan salvage, dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
- h. melakukan pemetaan alur sungai kebutuhan transportasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

10) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan

Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai tugas merekomendasikan izin usaha, izin trayek, izin pembangunan dan pengoperasian, izin pengembangan dan pengerukan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan dan kepelabuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat orang perorangan atau badan usaha;
- c. merekomendasikan izin usaha penyelenggaraa angkutan sungai dan penyeberangan orang perseorangan atau badan usaha;
- d. merekomendasikan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan serta izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- e. merekomendasikan/izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan penyeberangan, merekomendasikan izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpul lokal;
- f. merekomendasikan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;





- g. merekomendasikan izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. merekomendasikan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- i. merekomendasikan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melakukan pelayanan rekomendasi/pemberian izin usaha pelayaran rakyat (Pelra), bongkar muat angkutan barang khusus dan barang berbahaya, ekspedisi, angkutan sungai;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

11) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi lintas penyeberangan, pengoperasian kapal, pengamanan, penertiban, penegakan hukum, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api;
- c. melakukan pengamanan, penertiban, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sungai;
- d. melakukan pelayanan surat persetujuan berlayar dan pas perairan daratan kapal, melakukan pemeriksaan perlengkapan navigasi kapal dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
- e. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan dokumen pengawakan kapal di bawah GT 7 (<GT7);
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan





g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.4 SUMBER DAYA SKPD

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/perengkapan/ asset.

a. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	3	3	-
	- Eselon IV	9	8	1
	-Non Eselon	16	13	3
	Jumlah	29	25	4
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	1	1	0
	- SMA	12	11	1
	- D II	1	1	0
	- D III	2	1	1
	- D IV	0	0	0





	- S.1	10	8	2
	- S.2	2	2	0
	Jumlah	29	25	4
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	29	25	4
	- Kontrak	90	81	9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :	0	0	0
	- Diklat PIM II	1	1	0
	- Diklat PIM III	3	3	0
	- Diklat PIM IV			

b. Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Aset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	1 unit	
	e. Gedung UPTD Pelabuhan Sungai Ka. Tungkal	1 unit	
	f. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	





	g. Pelabuhan Penyeberangan RORO Ka. Tungkal	1 unit	
	h. Pos pengawasan di dermaga		
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	1 unit	
	i. Halte sungai	15 unit	
	Sarana		
2.	a. Kendaraan operasional kepala dinas	1 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	2 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	3 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	21 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)	2 unit	
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	





h. Traffic light	2 unit	
i. Guadrail	1 paket	
j. Median	1 paket	
k.Rambu sungai		

c. Kinerja Pelayanan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi maka infrastruktur sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Adapun prasarana yang ada di Dinas Perhubungan antara lain :

Prasarana pendukung operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

Bidang Perhubungan Darat

- a. UPTD Terminal Pembengis
- b. Terminal Kota
- c. Gedung UPTD Parkir
- d. Hanggar Bongkar Muat
- e. Kantor Pos Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan :

- a. UPTD Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal
- b. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal
- c. Pos Pengawasan di setiap dermaga yaitu :
 - Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal
 - Dermaga Tangga Raja Ulu
 - Dermaga Ampera





- Dermaga Pasar Kuatik

1.5 TANTANGAN, POTENSI, DAN PERMASALAHAN SKPD (analisis SWOT)

Urusan Perhubungan

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga





masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.

d. THREATS (ANCAMAN):

1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi

e. ISU – ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan





kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Eksternal:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya kinerja jaringan jalan;
3. Belum optimalnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
4. Belum optimalnya angkutan umum massal dan angkutan umum;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang
6. Tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi;

Internal:

1. Nilai evaluasi kinerja yang belum memadai;
2. Anggaran dan sarpras yang belum memadai.

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:





BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan data peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;





B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Melalui pendekatan Renstra yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memaduserasikan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan kinerja Kementerian Perhubungan disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Perhubungan. Rencana Kerja tersebut merupakan penjabaran dari Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja Eselon I sampai unit kerja Eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi perjanjian kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Kementerian Perhubungan Tahun 2018.





2.1.1 RELEVANSI RPJMD DAN SASARAN OPD

Tabel 2.1

Visi & Misi RPJMD

Visi RPJMD	“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “
Misi RPJMD :	
Misi 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas
Misi 2	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
Misi 3	: meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
Misi 4	: Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 1 RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktu Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas. Dengan sasaran 1.1 yaitu Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan



TABEL 2.2
MATRIKS RELEVANSI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan

MISI RPJMD

- **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas**

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan konektivitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Analisis Capaian Tujuan & Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	strategi	Arah kebijakan	Program	
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	1 Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal Pembengis	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

			2	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2	transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah, pemukiman, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			3	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor kepelabuhan	1%	1%	1%	5%	7%	10%	3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Peningkatan efektivitas pengawasan	Program peningkatan dan

		Laut.		Darat								fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan	n terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda	Pengamanan Lalu Lintas	
			2	Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5	4	3	3	3	2	2			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

												jalan dan faktor teknis kendaraan.	sector darat dan laut.	Fasilitas LLAJ
2	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	1	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (100%)	1	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban,	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

												kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.		
3	Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	78	80	80	85	A	1	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

												an	Aparatur	
			2	Nilai AKIP	CC	B	B	BB	BB	A	2	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
			3	Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi	0	0	0	0	0	0	3	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas	Peningkatan kualitas dan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

			dan Keuangan								Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.	penyelengg araan pelayanan transportasi melalui peningkata n pendidikan SDM Perhubunga n.	Aparatur
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------



2.1.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.





3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas





2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 2.3:**



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembegis	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	(100%)
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1%	1%	1%	1%	1%	1%	(100%)
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	1%	1%	1%	5%	7%	10%	(100%)
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	50 Kasus	40	30	20	10	5	5 Kasus
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 Kasus	4	3	3	3	2	2 Kasus
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (100%)	1.350 Unit (100%)

Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan



2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LAKIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada **Table 2.2.**

Program Prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2020

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>
1. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Rp. 335.000.000
2. Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Rp. 841.700.000
3. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 503.400.000
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 570.910.000
JUMLAH	Rp. 2,251,010,000





Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	0,5 %	Kepala Bidang Darat
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1 %	Kepala Bidang Darat dan UPT Sarana dan Prasarana
		Persentase Peningkatan Retribusi pelayanan pada sektor Kepelabuhan	5 %	Kepala Bidang Laut dan UPT Sarana dan Prasarana
2.	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	10 Kasus	Kepala Bidang Darat, Kasi Operasional dan Keselamatan
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Kasus	Kepala Bidang Laut, Kasi Keselamatan Pelayaran
3	Meningkatnya Tertib Laik kendaraan angkutan umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1300 UNIT	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor





a. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2016-2021 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 8 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana prasarana aparatur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan pengembang sistem pelaporan capaian kinerja;
5. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Peningkatan pelayanan angkutan
7. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
8. Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

b. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya. Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan administrasi perkantoran;

Indikator Kinerja : Persentase kepuasan aparatur

2. Peningkatan sarana prasarana aparatur;

Indikator Kinerja : Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak

Fungsi





3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
Indikator Kinerja : Prosentase sumber daya apartur yang mengikuti kegiatanpeningkatan kapasitas SDM.
4. Peningkatan pengembang sistem pelaporan capaian kinerja;
Indikator Kinerja : Nilai AKIP
5. Perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi
6. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar
7. Peningkatan pelayanan angkutan
Indikator Kinerja : Jumlah Meningkatnya jaminan pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan
8. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indikator Kinerja : jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas
9. Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
Indikator Kinerja : Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik Jalan.

c. **KELOMPOK SASARAN KEGIATAN**

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

“Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus”:





“Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus” :

% Pencapaian Rencana - (Realisasi-Rencana)

Rencana Tingkat Capaian = x 100% Rencana

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

Penilaian pencapaian kinerja pada laporan kinerja ini adalah dengan rumus pencapaian realisasi pelaksanaan indikator kinerja utama sasaran dibagi dengan target yang ingin dicapai sebelumnya pada indikator kinerja utama (IKU) sasaran tersebut. Indikator kinerja yang menjadi acuan pada penilakai LAKIP Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Realisas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan tahun 2018

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018			Target 2019			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	10	11	12	13	18	19	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	Rp80.000.000	Rp84.400.000	105.50%	Rp80.000.000	Rp101.824.000	127.28%	UPT Pengelola Sarana dan Prasarana, Dishub
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp150.000.000	Rp130.229.000	86.82%	Rp150.000.000	Rp154.103.000	102.74%	UPT Penguji Kendaraan Bermotor, Dishub
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Rp100.000.000	Rp141.906.000	141.91%	Rp100.000.000	Rp204.689.200	204.69%	UPT Pengelola Sarana dan Prasarana, Dishub
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	30	67	223.33%	20			Kepolisian, Dishub
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3	0	0.00%	3 Kasus	0 Kasus	Sangat Baik	Dishub, KPLP
3	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1188 Unit	1188	100%	1210 Unit	1210	100%	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor





Pengukuran dan Analisis Kinerja :

1. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran 1 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sector Transportasi Darat, Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Sasaran 1 memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Keuangan dan Capaian (%)

1. **Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi pada terminal pembengis.** Pada indicator ini Pencapaian Kinerja Tahun 2019 mencapai angka 127,28 % atau realisasi keuangan **Rp. 101.824.000** dari target **Rp. 80.000.000**. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sangat relative tinggi. Perbandingan antara persentase realisasi tahun 2018 (**105,50%**) dan persentase realisasi tahun 2019 (**127,28%**) mengalami peningkatan sebesar (**21,78%**) di tahun 2019.
2. **Indikator 2 : Persentase peningkatan retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.** Pada indicator ini Pencapaian Kinerja Tahun 2019 mencapai angka 102,74 % atau realisasi keuangan **Rp. 154.103.000** dari target **Rp. 150.000.000**. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sangat relative tinggi. Perbandingan antara persentase realisasi tahun 2018 (**86,82%**) dan persentase realisasi tahun 2019 (**102,74%**) mengalami peningkatan sebesar (**15,92%**) di tahun 2019.
3. **Indikator 3 : Persentase peningkatan retribusi pada sector Kepelabuhan.** Pada indicator ini Pencapaian Kinerja Tahun 2019 mencapai angka 204,69 % atau realisasi keuangan **Rp. 204.689.200** dari target **Rp. 100.000.000**. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sangat relative tinggi. Perbandingan antara persentase realisasi tahun 2018 (**141,91%**) dan persentase realisasi tahun 2019 (**204,69%**) mengalami peningkatan sebesar (**62,78%**) di tahun 2019.





Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Masih banyak sopir angkutan kendaraan yang tidak mau membayar jasa retribusi

❖ Solusi

- Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya uji kelaikan secara berkala
- Penyempurnaan penyediaan fasilitas perhubungan dan alat pengujian kendaraan bermotor
- Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan terhadap layanan angkutan

2. SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran strategis 2 Dinas Perhubungan adalah Menurunnya Tingkat Kecelakaan Darat dan Laut. Sasaran 2 memiliki 2 indikator kinerja untuk mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Keuangan dan Capaian (%)

1. Indikator 1 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat

Pada indicator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2019 mencapai angka atau realisasi dengan target 20 kasus.pada tahun 2019 pencapaian target sudah baik. Perbandingan atara realisasi di tahun 2018 dan realisasi di tahun 2019

2. Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan di dermaga sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan.

Pada indicator ini pencapaian kinerja tahun 2019 mencapai predikat **sangat baik**. Jumlah kasus kecelakaan di dermaga sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan adalah 0 kasus dengan target prediksi 3 kasus. Perbandingan antara kasus kecelakaan yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 terdapat peningkatan karena meurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan laut.





Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu lintas, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
- Kekurangan yang sangat signifikan juga menjadi penyebab seperti personil yang kompeten dibidang pengawasan/pengukuran kapal, nakhoda kapal, ahli analisis dampak lalu lintas, analisis sistem informasi dan programmer.
- Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penegakan hukum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

3. SASARAN STRATEGIS 3'

Sasaran 3 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum. Sasaran 3 memiliki 1 indikator kinerja untuk mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

1. **Indikator 1 : persentase kendaraan yang laik jalan.** Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2019 mencapai predikat **sangat baik**. Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 1210 unit dengan target di tahun 2019 1210 unit dengan realisasi capaian (100%). Perbandingan antara pencapaian kinerja di tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat sebesar **(1,6%)**.





Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalah :

- Kurangnya kesadaran pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan penumpang umum untuk mengurus perpanjangan Izin Trayek dan Kartu Pengawas angkutan karena banyaknya kendaraan angkutan yang tidak laik jalan dan tidak beroperasi lagi, begitu juga dengan pengusaha ataupun pemilik kendaraan yang tidak mau mengurus perpanjangan masa berlaku izinnya.
- Masih kurangnya fasilitas perhubungan yaitu alat uji pengujian kendaraan bermotor yang merupakan kunci utama untuk memberikan pelayanan prima dan sesuai standar.
- Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang transportasi dan teknologi informasi juga memberikan hambatan internal dalam melahirkan inovasi baru di bidang lalu lintas, angkutan dan pemberdayaan teknologi informasi.

❖ Solusi

- Penegakan hukum dan melaksanakan operasi razia rutin bekerja sama dengan satlantas dan PM untuk menertibkan kendaraan yang tidak memiliki izin laik jalan.
- Menjalin korelasi dengan pihak ketiga sebagai pengguna jasa transportasi untuk melakukan uji laik kendaraan secara berkala. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh baik untuk peningkatan PAD pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus.
- Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya uji laik kendaraan secara berkala.





3.2 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Tabel 3.2 Target dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi tahun 2019	
			Keuangan	Capaian (%)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir	Rp. 90.000.000	Rp. 4.995.000	5,55 %
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000.000	Rp. 154.103.000	102,74 %
3.	Retribusi Kepelabuhan	Rp. 100.000.000	Rp. 204.689.200	204,69 %
4.	Retribusi Terminal	Rp. 80.000.000	Rp. 101.824.000	127,28%

Permasalahan Dan Solusi

- Permasalahan :

- a. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan penumpang umum perdesaan untuk mengurus perpanjangan Izin Trayek dan Kartu Pengawas angkutan perdesaannya karena banyaknya kendaraan angkutan perdesaan yang tidak laik jalan dan tidak beroperasi lagi, begitu juga dengan pengusaha ataupun pemilik kendaraan yang tidak mau mengurus perpanjangan masa berlaku izinnya.
- b. Belum Tersedianya UPTD Pengelola Parkir
- c. Belum adanya acuan dan standar dalam penegakan hukum di bidang perhubungan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan (Transportasi).

- Solusi :

- a. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap layanan angkutan
- b. Membentuk UPTD Pakir





- c. Membuatkan Perda sebagai dasar melakukan penegakan aturan dengan mempedomani Perda Bidang Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Menurunkan target PAD

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Target dan Realisasi

a) Belanja Tidak Langsung

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Alokasi Anggaran | : Rp. 3.356.141.500 |
| - Realisasi Anggaran | : Rp. 2.947.790.941 |
| - Sisa Lebih Anggaran | : Rp. 408. 350.559 |

b) Belanja Langsung

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Alokasi Anggaran | : Rp. 3.050.522.220 |
| - Realisasi Anggaran | : Rp. 2.981.034.780 |
| - Sisa Lebih Anggaran | : Rp. 68.487.440 |

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.050.522.220,-** Realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.951.034.780,-** atau **97,72%** dan realisasi fisik **100%**. dengan melaksanakan **7 Program** dan **24 Kegiatan**.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 telah terlaksana dengan sangat baik dan sangat efisien.





Tabel 3.3 Realisasi Program, Kegiatan Anggaran dan Capaian Kinerja (%)
Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Output	Outcome	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Kebutuhan Dana/ Pagu	Rp	Rp (%)	
2		3	6			
URUSAN PERHUBUNGAN			3,050,522,220	2,981,034,780	98%	100%
Program Pelayanan Administrasi			661,662,220	637,303,088	96%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemabelian Matrai dan pembayaran paket/Pengiriman	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1,800,000	1,800,000	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	81,000,000	80,026,549	99%	100%
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas dengan baik	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	61,500,000	48,463,900	79%	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan	Lancarnya layanan administrasi keuangan	118,080,000	111,780,000	95%	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kebersihan Kantor	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	13,547,240	13,547,240	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK Kantor	Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran	49,845,780	48,810,090	98%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran	23,700,000	23,400,000	99%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran	7,611,200	7,611,200	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bacaan koran /majalah	Tersedianya Informasi Publik	6,000,000	6,000,000	100%	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya makanan dan minuman	lancarnya pelaksanaan administrasi	4,200,000	2,700,000	64%	100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Lancarnya Konsultasi & koordinasi ke luar	294,378,000	293,164,109	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			595,090,000	583,529,692	98%	100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya Operasional Perkantoran	63,000,000	61,825,000	98%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam keadaan baik	Meningkatnya layanan perkantoran	56,100,000	55,963,000	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Lancarnya Operasional Perkantoran	417,440,000	408,525,624	98%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	58,550,000	57,216,068	98%	100%



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Output	Outcome	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Kebutuhan Dana/ Pagu	Rp	Rp (%)	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			62,500,000	62,150,000	99%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan kinerja dan disiplin pegawai	62,500,000	62,150,000	99%	100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			19,800,000	19,700,000	99%	100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah tersuunnnya dokumen perencanaan	Terpenuhinya laporan kinerja dan keuangan	19,800,000	19,700,000	99%	100%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJSDP		Prasarana dan fasilitas LLAJSDP	150,420,000	150,109,000	100%	100%
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Meningkatnya layanan kepada masyarakat	150,420,000	150,109,000	100%	100%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Kenyamanan masyarakat berlalu lintas	1,060,990,000	1,038,082,000	98%	100%
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dan	Terlaksananya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	529,800,000	525,690,000	99%	100%
Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan dikawasan pelabuhan	188,700,000	187,260,000	99%	100%
Forum lalu lintas angkutan jalan	jumlah terlaksananya rapat - rapat pembahasan Forum LLAJ	Meningkatnya sinergitas antara TNI, Polri, Instansi terkait dan penyedia angkutan	13,200,000	13,200,000	100%	100%
Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah terlaksananya pengamanan hari hari besar nasional dan daerah	Terciptanya lalu lintas lancar dan aman	175,000,000	166.667,000	95%	100%
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan	154,290,000	145.265,000	94%	100%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	500,060,000	490,161,000	98%	100%
Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya lalu lintas lancar tertib dan aman	500,060,000	490,161,000	98%	100%
			3,050,522,220	2,981,034,780	98%	100%



c. **PERMASALAHAN DAN SOLUSI CPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN**

- **PERMASALAHAN**

1. **Adanya Kegiatan yang tidak terlaksana/ Realisasi Fisik Tidak Mencapai 100%**
Berdasarkan uraian table diatas dapat kami uraikan bahwa tidak ada permasalahan pada pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat. Realisasi keuangan dan fisik pada **program dan kegiatan** telah mencapai **100%** atau sudah memenuhi target.
2. **Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir tidak Mencapai Target**
Pada tahun 2019 terdapat satu jenis retribusi yang tidak mencapai target yaitu retribusi pengelolaan parkir dengan realisasi Rp. 4.995.000,- atau (5,55%) Target Rp. 90.000.000,- . Rendahnya realisasi tersebut dikarenakan tidak tersedianya UPTD Parkir yang menjadi landasan dasar pemungutan retribusi parkir dan juga disebabkan karena kebanyakan para sopir kendaraan yang tidak membayar retribusi parkir tersebut dengan alasan mereka tidak menggunakan area parkir tepi jalan sebagai sarana parkir kendaraan mereka. Selain itu juga rendahnya realisasi retribusi parkir dikarenakan tumpang tindih antara PKL dan lahan parkir yang ada, adanya beberapa lahan parkir yang ditutup demi kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas.
3. **Kompleksnya Persoalan Transportasi**
Persoalan klasik transportasi yang sering dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung barat seperti halnya yang di hadapi kabupaten lain kemacetan pada ruas jalan tertentu, kecelakaan lalu lintas serta polusi udara. Penyebab persoalan tersebut antara lain pertumbuhan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang jauh melampaui tingkat pertumbuhan kapasitas jalan, kurangnya kesadaran/disiplin pengguna jalan untu tertib lalu lintas, dan kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Persoalan tersebut juga dinilai berdampak pada nilai ekonomi dan social.





4. Trayek dan distribusi angkutan umum belum optimal

Dinas perhubungan kabupaten tanjung jabung barat bekerja sama dengan pihak ketiga telah mendistribusikan angkutan umum untuk mengangkut penumpang dari kota Kuala Tungkal menuju ke kecamatan Senyerang. Penyediaan layanan dan pengembangan trayek tersebut dinilai masih kurang dan perlu dilakukan reorganisasi trayek angkutan kabupaten untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan

marka, rambu lalu lintas, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu instrument menuju keselamatan lalu lintas (traffic safety), ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas. Keterbatasan ini semata disebabkan oleh kemampuan keuangan Pemerintah Kota Padang yang masih belum memadai untuk memenuhinya.

6. Kurangnya Partisipasi warga kabupaten

Ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku manusia, termasuk di dalamnya sopir angkutan umum. Selain dituntut untuk mengetahui dan memahami aturan lalu lintas, para pengguna jalan juga dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku dengan penuh disiplin. Fakta yang ada belum seluruh pengguna jalan bisa berlaku disiplin di jalan raya sebagaimana mestinya. Disamping itu, penggunaan fasilitas transportasi untuk kepentingan lain menyebabkan kapasitas ideal fasilitas tersebut menjadi terganggu disamping juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masalah klasik yang sering dihadapi beralih fungsinya trotoar dan badan jalan menjadi fungsi lain sehingga fasilitas transportasi tidak dapat digunakan secara optimal. Dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak dapat mengatasi persoalan tersebut secara mandiri karena menyangkut tugas pokok/kewenangan unit kerja lain dan tuntutan pihak-pihak tertentu.





7. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Terbatas

Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang transportasi dan teknologi informasi juga memberikan hambatan internal dalam melahirkan inovasi baru di bidang lalu lintas, angkutan dan pemberdayaan teknologi informasi. Kekurangan yang sangat signifikan adalah personil yang kompeten dibidang pengawasan/pengukuran kapal, nakhoda kapal, ahli analisis dampak lalu lintas, analis sistem informasi dan programmer. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya hasil pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjawab tantangan persoalan transportasi dan teknologi informasi di lapangan yang semakin dinamis.

8. Minimnya fasilitas pelabuhan penyeberangan RORO

Penyempurnaan penyediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan ro-ro sangat perlu di tingkatkan untuk kenyamanan dan keamanan penumpang. Pelabuhan penyeberangan ro-ro menyediakan trayek Kuala Tungkal – Dabo Singkep, Kuala Tungkal Tungkal – Dabo Singkep – Batam, Kuala Tungkal – Batam.

- Solusi

1. Melakukan penyesuaian terhadap target serta mengoptimalkan pengawasan terhadap PAD

Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pencapaian retribusi seperti retribusi perparkiran di tepi jalan umum yang membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait. Hal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran dan tidak tersedianya UPTD Parkir. Untuk itu perlu dilakukan penganggaran dalam mendukung kegiatan ini dan membentuk UPTD Parkir. Selain itu perlu adanya penyesuaian target realisasi PAD terkait dengan kondisi saat ini. Selanjutnya perlu adanya penindakan tegas terhadap pelanggaran atau pungutan parkir liar dan perlu sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan berkelanjutan.

2. Melakukan kajian dan koordinasi dengan stakeholder





Forum Lalu Lintas merupakan wadah kerjasama dan koordinasi untuk mencari solusi mengatasi permasalahan transportasi yang makin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan secara mandiri. Diharapkan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) ini dapat dicarikan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Selain forum lalu lintas, koordinasi dan konsultasi juga giat dilakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kementerian Perhubungan.

3. Implementasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jalan terutama pada peakhour pagi dan sore/malam hari, berbagai teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas telah dilakukan diantaranya pemberlakuan sistem satu arah dan larangan parkir. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya traffic jam dan mempertahankan waktu tempuh ideal pada ruas-ruas jalan utama dalam kota. Sedangkan untuk mengantisipasi dampak ikutan yang muncul terhadap lalu lintas pada kawasan sekitarnya akibat pembangunan pusat-pusat kegiatan seperti mall dan hotel, maka Analisis Dampak Lalu Lintas menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi pengembang sebelum IMB diberikan oleh pihak terkait.

4. Kajian kinerja jaringan trayek dan distribusi kebutuhan angkutan umum

Membentuk jaringan trayek yang optimal dan distribusi armada angkutan umum yang ideal. Penentuan lokasi terminal disesuaikan rencana tata ruang kota yang mendukung adanya pemecahan tujuan perjalanan dari satu CBD ke beberapa sub CBD.

5. Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dari APBN

Salah satu upaya menyiasati minimnya kemampuan keuangan dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan adalah dengan bantuan dana APBN dan dana APBD Pemerintah Provinsi Jambi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mensinergikan renstra Kabupaten Tanjung Jabung Barat urusan Perhubungan dengan renstra Kementerian Perhubungan dan renstra Pemerintah Propinsi.

6. Penegakan hukum





Operasi penertiban dalam rangka penegakan hukum tetap dilakukan untuk menjaga konsistensi dan wibawa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang lalu lintas. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dan kontinyu dengan institusi lain yang terkait agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif.

7. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan kuantitas personil, Dishub berupaya melakukan penambahan personil melalui penerimaan penempatan personil dari SKPD lain melalui BKPSDM dan juga mengusulkan penambahan tenaga kontra. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas personil ditempuh dengan mengirimkan ke diklat teknis perhubungan. Selain itu juga telah dilakukan MOU dengan Pihak STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dalam hal rekrutman personil yang berkompeten di bidang perhubungan.

8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Bungus

Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana di Pelabuhan Penyeberang RORO dengan menggunakan dana APBN yang dikelola oleh Balai Transportasi Darat dan Rehabilitas Melalui dana APBD.





BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 sangat baik baik, dikarenakan terdapat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat melampaui beberapa target dalam Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019, sehingga terlihat nilai manfaat dari pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan dirasakan masyarakat. Pencapaian IKU Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN STARATEGIS 1

Sasaran 1 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sector Transportasi Darat, Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Sasaran 1 memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Keuangan dan Capaian (%)

1. **Indikatpr 1 : Persentase peningkatan retribusi pada terminal pembengis.** Pada indicator ini Pencapaian Kinerja Tahun 2019 mencapai angka 127,28 % atau realisasi keuangan **Rp. 101.824.000** dari target **Rp. 80.000.000**. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sangat relatife tinggi. Perbandingan antara persentase realisasi tahun 2018 (**105,50%**) dan persentase realisasi tahun 2019 (**127,28%**) mengalami peningkatan sebesar (**21,78%**) di tahun 2019.
2. **Indikator 2 : Persentase peningkatan retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.** Pada indicator ini Pencapaian Kinerja Tahun 2019 mencapai angka 102,74 % atau realisasi keuangan **Rp. 154.103.000** dari target **Rp. 150.000.000**. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sangat relatife tinggi. Perbandingan antara persentase realisasi tahun 2018 (**86,82%**) dan persentase realisasi





tahun 2019 (**102,74%**) mengalami peningkatan sebesar (**15.92%**) di tahun 2019.

3. **Indikator 3 : Persentase peningkatan retribusi pada sector Kepelabuhan.** Pada indicator ini Pencapaian Kinerja Tahun 2019 mencapai angka 204,69 % atau realisasi keuangan **Rp. 204.689.200** dari target **Rp. 100.000.000**. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sangat relatife tinggi. Perbandingan antara persentase realisasi tahun 2018 (**141,91%**) dan persentase realisasi tahun 2019 (**204,69%**) mengalami peningkatan sebesar (**62.78%**) di tahun 2019.

2. SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran strategis 2 Dinas Perhubungan adalah Menurunnya Tingkat Kecelakaan Darat dan Laut. Sasaran 2 memiliki 2 indikator kinerja untuk mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Keuangan dan Capaian (%)

1. Indikator 1 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat.

Pada indicator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2019 mencapai angka atau realisasi dengan target 20 kasus.pada tahun 2019 pencapaian target sudah baik. Perbandingan atara realisasi di tahun 2018 dan realisasi di tahun 2019

2. Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan di dermaga sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan.

Pada indicator ini pencapaian kinerja tahun 2019 mencapai predikat **sangat baik**. Jumlah kasus kecelakaan di dermaga sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan adalah 0 kasus dengan target prediksi 3 kasus. Perbandingan antara kasus kecelakaan yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 terdapat peningkatan karena meurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan laut.





3. SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran 3 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum. Sasaran 3 memiliki 1 indikator kinerja untuk mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

1. **Indikator 1 : persentase kendaraan yang laik jalan.** Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2019 mencapai predikat **sangat baik**. Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 1210 unit dengan target di tahun 2019 1210 unit dengan realisasi capaian (100%). Perbandingan antara pencapaian kinerja di tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat sebesar **(1,6%)**.

Tabel 3.1 Realisas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan tahun 2018

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018			Target 2019			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	10	11	12	13	18	19	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	Rp80,000,000	Rp84,400,000	105.50%	Rp80,000,000	Rp101,824,000	127.28%	UPT Pengelola Sarana dan Prasarana, Dishub
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp150,000,000	Rp130,229,000	86.82%	Rp150,000,000	Rp154,103,000	102.74%	UPT Penguji Kendaraan Bermotor, Dishub
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhanan	Rp100,000,000	Rp141,906,000	141.91%	Rp100,000,000	Rp204,689,200	204.69%	UPT Pengelola Sarana dan Prasarana, Dishub
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	30	67	223.33%	20			Kepolisian, Dishub
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3	0	0.00%	3 Kasus	0 Kasus	Sangat Baik	Dishub, KPLP
3	Meningkat nya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1188 Unit	1188	100%	1210 Unit	1210	100%	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Selain itu Pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.**





3.050.522.220,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.951.034.780,- atau 97,72% dan realisasi fisik 100%. dengan melaksanakan 7 Program dan 24 Kegiatan.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 telah terlaksana dengan sangat baik dan sangat efisien.

**Tabel 3.3 Realisasi Program, Kegiatan Anggaran dan Capaian Kinerja (%)
Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Output	Outcome	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Kebutuhan Dana/ Pagu	Rp	Rp (%)	
2		3	6			
URUSAN PERHUBUNGAN			3,050,522,220	2,981,034,780	98%	100%
Program Pelayanan Administrasi			661,662,220	637,303,088	96%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemabelian Matri dan pembayaran paket/Pengiriman	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1,800,000	1,800,000	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	81,000,000	80,026,549	99%	100%
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dlnas dengan baik	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	61,500,000	48,463,900	79%	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan	Lancarnya layanan administrasi keuangan	118,080,000	111,780,000	95%	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kebersihan Kantor	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	13,547,240	13,547,240	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK Kantor	Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran	49,845,780	48,810,090	98%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran	23,700,000	23,400,000	99%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran	7,611,200	7,611,200	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bacaan koran /majalah	Tersedianya Informasi Publik	6,000,000	6,000,000	100%	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya makanan dan minuman	lancarnya pelaksanaan administrasi	4,200,000	2,700,000	64%	100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Lancarnya Konsultasi & koordinasi ke luar	294,378,000	293,164,109	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			595,090,000	583,529,692	98%	100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya Operasional Perkantoran	63,000,000	61,825,000	98%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam keadaan baik	Meningkatnya layanan perkantoran	56,100,000	55,963,000	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Lancarnya Operasional Perkantoran	417,440,000	408,525,624	98%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	58,550,000	57,216,068	98%	100%





Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Output	Outcome	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Kebutuhan Dana/ Pagu	Rp	Rp (%)	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			62,500,000	62,150,000	99%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan kinerja dan disiplin pegawai	62,500,000	62,150,000	99%	100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			19,800,000	19,700,000	99%	100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah tersuunnnya dokumen perencanaan	Terpenuhinya laporan kinerja dan keuangan	19,800,000	19,700,000	99%	100%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJSDP		Prasarana dan fasilitas LLAJSDP	150,420,000	150,109,000	100%	100%
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Meningkatnya layanan kepada masyarakat	150,420,000	150,109,000	100%	100%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Kenyamanan masyarakat berlalu lintas	1,060,990,000	1,038,082,000	98%	100%
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dan	Terlaksananya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	529,800,000	525,690,000	99%	100%
Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Frekuensi Pengawasan, Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan dikawasan pelabuhan	188,700,000	187,260,000	99%	100%
Forum lalu lintas angkutan jalan	jumlah terlaksananya rapat - rapat pembahasan Forum LLAJ	Meningkatnya sinergitas antara TNI, Polri, Instansi terkait dan penyedia angkutan	13,200,000	13,200,000	100%	100%
Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah terlaksananya pengamanan hari hari besar nasional dan daerah	Terciptanya lalu lintas lancar dan aman	175,000,000	166,667,000	95%	100%
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Terciptanya penciptaan keamanan dan kenyamanan menjadi baik	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan	154,290,000	145,265,000	94%	100%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	500,060,000	490,161,000	98%	100%
Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya lalu lintas lancar tertib dan aman	500,060,000	490,161,000	98%	100%
			3,050,522,220	2,981,034,780	98%	100%





4.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Perhubungan terus berusaha memperbaiki sistem penataan transportasi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Transportasi sendiri merupakan faktor utama yang menjadi sarana penghubung untuk mendukung berkembangnya kemajuan ekonomi, sosial dan demokrasi.

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2019, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Visi Misi Dinas Perhubungan dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan *Lesson Learned* bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju dan Sejahtera untuk semua. Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2019, untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disampaikan beberapa pemetaan atau rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan panduan untuk menghindari resiko dan meningkatkan kinerja dinas perhubungan, antara lain:

- 1) Melakukan Regulasi terhadap target serta mengoptimalkan pemetaan area parkir.
- 2) Memastikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, misalnya: melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak;
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian Indikator Kinerja Utama;





- 5) Melakukan penyempurnaan IKU yang bersifat outcome sampai dengan level Eselon I, dan selarasantara unit kerja dengan unit kerja di bawahnya;
- 6) Meningkatkan penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- 7) Agar memprioritaskan program pelayanan masyarakat
- 8) Efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
- 9) Diperlukan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kinerja yang terintegrasi dan terpadu guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat capaian kinerja lebih mudah dapat tercapai.
- 10) Memacu Pembangunan Infrastruktur perhubungan dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung dan menciptakan keamanan dan kenyamanan penguuna jasa transportasi.
- 11) Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak, serta diperlukan penganggaran yang besar baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Perencana Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001





LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT




DINAS PERHUBUNGAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN

2019

PERJANJIAN KINERJA

& CASCADING

 (0742) 7351069

 dishub.ktl@gmail.com

 www.dishub.tanjabbarkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS Telp. (0742) 7351069
KUALA TUNGKAL

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Melalui Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 550/ *338* /DISHUB/2019
Tanggal : *20* Mei 2019
Perihal : Mohon Penandatanganan Penetapan Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 061/50/ORG tanggal 8 Januari 2019 Perihal : Permintaan Data Sakip Tahun 2019, maka diminta kepada setiap OPD agar segera menyampaikan dokumen laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) diantaranya Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Perjanjian Kinerja atas nama tersebut dibawah ini, yaitu :

N a m a : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19650619 198512 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Tanjung Jabung Barat

Demikian kami laporkan, petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya akan kami pedomani dan dilaksanakan, terima kasih.


Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

Wth. Bpk Bupati 10/05/19
Wth. Bpk Sekda 11/05/19



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, 



Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama



Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tertib Laik kendaraan Angkutan umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1210 UNIT	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	20 Kasus	Kepala Bidang Darat, Kasi Operasional dan Keselamatan
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Kasus	Kepala Bidang Laut, Kasi Keselamatan Pelayaran
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	0,5 %	Kepala Bidang Darat
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1 %	Kepala Bidang Darat dan UPT Sarana dan Prasarana
		Persentase Peningkatan Retribusi pelayanan pada sektor Kepelabuhan	5 %	Kepala Bidang Laut dan UPT Sarana dan Prasarana
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Dinas Perhubungan
		Nilai AKIP	78	Dinas Perhubungan
		Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan Administrasi dan Keuangan	Dinas Perhubungan dan BPK

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Rp. 1.062.670,00
2. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 8.800.000,00
3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 535.820.000,00
JUMLAH	Rp. 545.682.670,00

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



Dr. Ir. SAFRIAL, MS

Pihak Pertama



Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19650619 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALMARDI,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama

ALMARDI,SE
Pembina
NIP.19650326 199303 1 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi & Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	a. Rata - Rata IKM Pertriwulan	79
		b. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhi	80%
		c. Persentase pemenuhan Komponen Sakip	100%
		d. Persentase Pemenuhan Komponen administrasi keuangan / aset	80%

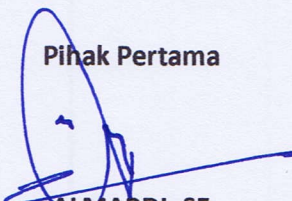
PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 666.334.220,00	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 577.330.000,00	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 62.500.000,00	
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 18.300.000,00	
5 Program peningkatan pelayanan angkutan - Keiatan Penciptaan keamanan dan Kenyamanan di lingkungan terminal	Rp. 530.280.000,00	
- Posko Pengamanan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	Rp. 1.750.000.000,00	
JUMLAH	Rp. 3.604.744.220,00	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua


Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama


ALMARDI, SE
Pembina Tk.I/Ivb
NIP. 19650326 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL WAHAB**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

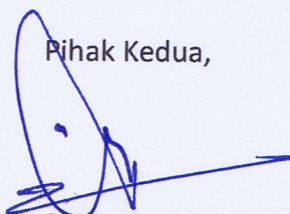
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **ALMARDI,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ALMARDI,SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 19650326 199303 1 001

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama



ABDUL WAHAB
Penata Muda TK.I/IIIb
NIP.19610210 198602 1 003

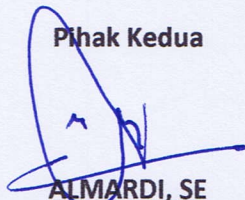
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Kasubbag Umum dan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur	a. Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan	b. Rata - Rata IKM Aparatur	78
		c. Jumlah Dokumen Administrasi perkantoran Keuangan	1 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp. 666.334.220,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 577.330.000,00
3 Program Peningkatan Disiplin Apratur	Rp. 62.500.000,00
JUMLAH	Rp. 1.306.164.220,00

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua

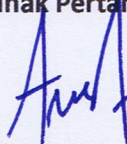


ALMARDI, SE

Pembina Tk.I/lvb

NIP. 19650326 199303 1 003

Pihak Pertama



ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

Nip. 19610210 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PITRIYANA, SH**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **ALMARDI,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama

PITRIYANA, SH

Penata/IIIc

NIP.19650326 199303 1 003

Pihak Kedua,

ALMARDI,SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 19650326 199303 1 001

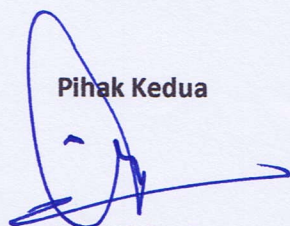
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Komponen Pemenuhan Dokumen Sakip	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun yaitu Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	6 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	18.300.000,00
JUMLAH	Rp.	18.300.000,00

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



ALMARDI, SE
Pembina Tk.I/Ivb
NIP. 19650326 199303 1 003

Pihak Pertama



PITRIANA, SH
Penata/IIIc
NIP. 19810902 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I**
Jabatan : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I
pPembina/IVa
NIP. 19670622 198903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG DARAT DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan, pengendalian, keselamatan dan tertib lalu lintas	a. Persentase Jumlah pendapatan sektor angkutan darat	0,1%
		c. Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	26%
		d. Jumlah terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	5 KEGITAN
		e. Rasio Rambu terpsang (pada Titik rawan kecelakaan)	150 Unit
		e. Rata - Rata IKM Terhadap layanan Transportasi Darat	78

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp. 13.200.000	
2 program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp. 535.820.000	
3 Program peningkatan kelaikan pengopersian kendaraan bermotor	Rp. 8.800.000	
JUMLAH	557.820.000	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama



JUNAIDI TANJUNG, S.sos.I
Pembina /Iva
NIP. 19670622 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WARASUSIYANTA**
Jabatan : Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I**
Jabatan : Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I

Pembina/IVa

NIP. 19670622 198903 1 003

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama

WARASUSIYANTA

Penata TK./IIId

NIP.19620303 198411 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASI SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Pemeliharaan Perlengkapan dan peralatan lalu lintas	a. Jumlah Pemeliharaan alat keselamatan Lalu lintas	140 Unit
2	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	b. Jumlah Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	5 Unit
		d. persentase IKM terhadap Penyediaan Layanan Transportasi di bidang darat	78

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 8.800.000,00	
JUMLAH	Rp. 8.800.000,00	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



JUNAIDI TANJUNG, S.sos.I

Pembina /Iva

NIP. 19670622 198903 1 003

Pihak Pertama



WARASUBANTA

Penata TK.I/IIId

NIP. 19620303 198411 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARYADI**
Jabatan : Kasi Operasi Dan Keselamatan Bidang Perhubungan Darat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I**
Jabatan : Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua,

JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I

Pembina/IVa

NIP. 19670622 198903 1 003

Pihak Pertama

HARYADI

Penata Muda TK.I/IIIb

NIP.19710404 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASI OPERASIONAL & KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik DAN Tercapainya penyelenggaraan Operasi lalu lintas	a. jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas	30 Kali
		c. Jumlah pengamanan Posko hari hari besar	6 Kali

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
- Posko Pengamanan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	Rp. 175.000.000,00	
- Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	Rp. 530.280.000,00	
JUMLAH	Rp. 705.280.000,00	

Kuala Tungkal, 26 Mei 2019

Pihak Kedua

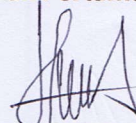


JUNAIDI TANJUNG, S.sos.I

Pembina /Iva

NIP. 19670622 198903 1 003

Pihak Pertama



HARIYADI

Penata/IIIc

NIP. 19710404 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EBTA S. MUHI, ST**
Jabatan : Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I**
Jabatan : Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JUNAIDI TANJUNG,S.sos.I
Pembina/Iva
NIP. 19670622 198903 1 003

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama

EBTA S. MUHI, ST
Penata Muda TK.I/IIId
NIP.19830608 198411 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya pengendalian Angkutan dan Menurunnya Pelanggaran angkutan Penumpang dan Barang	a. Jumlah Pengendalian Angkutan Umum dan Jaringan Trayek	2 Kali
		b. Penerbitan Rekomendasi izin yang berkaitan dengan angkutan orang dan barang	2 Dokumen
		c. jumlah Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum dan Barang	40 kasus
		d. Rata - Rata IKM terhadap Layanan rekomendasi izin	78

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 535.820.000,00	

JUMLAH **535.820.000,00**

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



JUNAIIDI TANJUNG, S.sos.I

Pembina /Iva

NIP. 19670622 198903 1 003

Pihak Pertama



EBTA S. MUHI, ST

Penata Muda TK.I/IIId

NIP. 19830608 198411 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUSUSIAWAN, S.Pd**
Jabatan : Kabid Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650619 198512 1 001

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama

AGUSUSIAWAN, S.Pd

Pembina/IVa

NIP. 19680806 198903 1 005

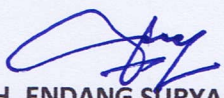
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KABID LAUT DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan rehabilitas prasana dan fasilitas LLAJ	a. Jumlah pendapatan sektor angkutan Laut	0,1%
		b. Jumlah Terlaksananya Pengawasan Keamanann dan Kenyamanan Penumpang	2 lokasi
		D. Rata - Rata IKM Terhadap Layanan Transportasi Laut	78


PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan penyeberangan	Rp. 188.700.000,00	
- Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Rp. 155.490.000,00	
2 Program Rehabilitasi dan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rp. 58.768.000,00	
JUMLAH	Rp. 402.958.000,00	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua


Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama


AGUSUSIAWAN, S.Pd
Pembina /Iva
NIP. 19660618 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAFENDI**
Jabatan : Kasi Angkutan Dan Kepelabuhan Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama


Nama : **AGUSUSIAWAN, S.Pd**
Jabatan : Kabid Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

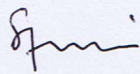
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


AGUSUSIAWAN, S.Pd
Penata/IVa
NIP. 19680806 198903 1 005

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama


HAFENDI
Penata/IIId
NIP.19620804 198503 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ANGKUTAN DAN PELABUHAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Kepelabuhan	a. Jumlah Laporan operasional penumpang dan bongkar muat barang	1 Dokumen
		c. Persentase rata rata IKM Pelayanan Pelabuhan	78

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
- Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan penyeberangan	Rp. 188.700.000,00	
- Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Rp. 155.490.000,00	
JUMLAH	Rp. 344.190.000,00	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua

AGUSUSIAWAN, S.Pd

Pembina /Iva

NIP. 19660618 199203 1 006

Pihak Pertama

HAFENDI

Penata/IIId

NIP. 19620804 198503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI M**
Jabatan : Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan
Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **AGUSUSIAWAN, S.Pd**
Jabatan : Kabid Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

AGUSUSIAWAN, S.Pd

Pembina/IVa

NIP. 19680806 198903 1 005

HERI M

Penata/IIId

NIP.19640423 1990033 1 006

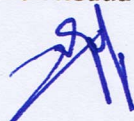
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASI SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	TerLaksananya Pemeliharaan Halte sungai pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan dan Fasilitas penunjang	a. Jumlah Pemeliharaan halte sungai	6 Lokasi
		b. Jumlah Pemeliharaan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	2 Lokasi

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program rehabilitasi dan pemeliharaan	Rp. 56.768.000,00	
JUMLAH	Rp. 56.768.000,00	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



AGUSUSIAWAN, S.Pd

Pembina /Iva

NIP. 19660618 199203 1 006

Pihak Pertama



HERI. M

Penata/IIId

NIP. 19640423 1990033 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDRA HADISAPUTRA, SE**
Jabatan : Kasi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan
Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **AGUSUSIAWAN, S.Pd**
Jabatan : Kabid Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUSUSIAWAN, S.Pd

Penata/IVa

NIP. 19680806 198903 1 005

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Pertama

INDRA HADISAPUTRA, SE

Penata/IIIc

NIP. 19840510 200804 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Kasi Keselamatan dan Pelayaran DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan terlaksananya keselamatan pelayaran	a. Frekuensi pengawasan Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	16 Kali

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
- Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan penyeberangan	Rp. 188.700.000,00	
- Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Rp. 155.490.000,00	
JUMLAH	Rp. 344.190.000,00	

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Pihak Kedua



AGUSUSIAWAN, S.Pd

Pembina /Iva

NIP. 19660618 199203 1 006

Pihak Pertama



INDRA HADISAPUTRA, SE

Penata/Ilc

NIP. 19840510 200804 1 002

TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNGPING BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS

Kuala Tunggal, Juli 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNGPING BARAT

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19850619 198512 1 001

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNGPING BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS

MISI :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

TUJUAN 1.1 :

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS

SASARAN 1.1 :

MENINGKATNYA KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN KONEKTIVITAS

SASARAN 1	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2018 76
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76
Nilai AKIP	78
Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan Administrasi dan Keuangan dan Keuangan

SASARAN 2	
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2018 30 Kasus
Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	20 Kasus
Jumlah prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi di Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Kasus

SASARAN 3	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2018 Rp. 150.000.000
Persentase Peningkatan Retribusi pada Sektor Transportasi Darat Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 80.000.000
Persentase Peningkatan Retribusi pada Sektor Transportasi Darat Pada Terminal Pembongis	Rp. 80.400.000
Persentase Peningkatan Retribusi pada Sektor Transportasi Laut Pada UPT Sarana Dan Prasarana (Kepelabuhan)	Rp. 105.000.000

SASARAN 4	
Meningkatnya Tertib Lait Kendaraan Angkutan Umum	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2018 1188 unit
Persentase Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1210 Unit (naik 22 kendaraan / 1,4 %)

SEKRETARIS	
Sasaran	INDIKATOR
	IKM pertriwulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhi Persentase Pemenuhan Komponen AKIP Persentase Pemenuhan Komponen Administrasi Keuangan / Aset

KEPALA BIDANG LAUT	
SASARAN	INDIKATOR
	Jumlah Pendapatan Sektor Kepelabuhan
Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan Rehabilitas Prasarana dan Fasilitas LLASDP	Jumlah terlaksananya Pengawasan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Rata - Rata IKM terhadap Layanan Transportasi Laut

KEPALA BIDANG DARAT	
SASARAN	INDIKATOR
	Persentase Kendaraan Yang memenuhi standar laik uji Rasio Rambu - Rambu Terpasang pada titik tertentu
Meningkatnya Pelayanan Angkutan, pengendalian, Keselamatan dan Tertib Lalu Lintas	Jumlah terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase Jumlah Pendapatan Sektor Angkutan Darat Rata - Rata IKM terhadap Layanan Transportasi Darat

KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN LAPORAN PROGRAM	
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya komponen dan pemenuhan Dokumen SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PKJ), indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Rata - Rata IKM Aparatur
	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran Keuangan

KASI ANGKUTAN DAN PELABUHAN	
SASARAN	INDIKATOR
	Jumlah Laporan Operasional Penumpang dan Bongkar Muat Barang
	Rata - Rata IKM Pelayanan Pelabuhan

KASI SARANA DAN PRASARANA	
SASARAN	INDIKATOR
	Tercapainya Pemeliharaan Perengkapan dan Peralatan Lalu Lintas
	Jumlah Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalir Lintas
	Jumlah Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
	IKM terhadap Penyediaan Layanan Transportasi di Bidang Darat

KASUBBAG UJUMIH DAN KEPEGAWAIAN	
SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Rata - Rata IKM Aparatur
2. Meningkatkan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran Keuangan

KASI KESELAMATAN PELAYANAN	
SASARAN	INDIKATOR
	Frekuensi Pengawasan Pengendalian Sungai, Danau dan Penyeberangan

KASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
SASARAN	Indikator
	Jumlah Pengendalian Angkutan Umum dan Jaringan Trayek
	Penerbitan Rekomendasi Izin Yang Berkaitan Dengan Angkutan Orang dan Barang
	Rata - Rata IKM terhadap Layanan rekomendasi izin
	Jumlah Penumpang Pelanggaran Angkutan Umum dan Barang



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

TAHUN 2019

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIKE ARMALINA, A.Md**
Jabatan : **Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

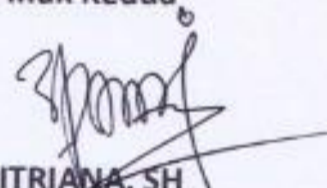
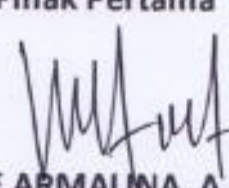
Nama : **PITRIYANA, SH**
Jabatan : **Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program**
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua</p>  <p>PITRIANA, SH Penata/IIIc NIP. 19810902 200501 2 008</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>MIKE ARMALINA, A.Md Penata Muda/IIIa NIP. 19821026 200901 2 007</p>
---	---



**TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI PEDOMAN.	• Menyiapkan bahan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Progam sesuai dengan prosedur yang berlaku.	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang Menyiapkan Semua data - data dan laporan guna penyusunan perencanaan dinas.	12 Bln
	• Menghimpun data - data dan Laporan Untuk Penyusunan Laporan Perencanaan dari Setiap bidang.	12 Bln
	• Menganalisa data - data dan laporan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan perencanaan.	6 Dok
	• Mengevaluasi data - data dan Laporan yang merupakan bagian dari perencanaan	6 Dok
	• Jumlah Laporan Perencanaan Yang telah di analisa sesuai dengan prosedur.	6 Dok
	• Melaporkan Laporan Perencanaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan	6 Dok

Pihak Kedua

PITRIANA, SH

Penata/IIIc

NIP. 19810902 200501 2 008

Pihak Pertama

MIKE ARMALINA, A.Md

Penata Muda/IIIa

NIP. 19821026 200901 2 007



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL MALIK**
Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL WAHAB**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Barat
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua</p>  <p>ABDULWAHAB Penata Muda TK.I/IIIb Nip. 19610210 198602 1 003</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>ABDUL MALIK Pengatur /I/c Nip. 19830607 200901 1 010</p>
---	--



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN SESUAI PROSEDUR.	• Menyiapkan bahan verifikasi keuangan sesuai dokumen usulan pencairan anggaran rutin dan kegiatan bidang.	12 Bln
	• Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang akan dikerjakan meliputi verifikasi keuangan anggaran rutin dan kegiatan bidang.	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi verifikasi keuangan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.	12 Bln
	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi verifikasi keuangan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung	2 Dok
	• Jumlah laporan hasil pelaksanaan verifikasi keuangan yang sesuai prosedur.	2 Dok
	• Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi keuangan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.	2 Dok

Pihak Kedua

ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

Nip. 19610210 198602 1 003

Pihak Pertama

ABDUL MALIK

Pengatur /IIc

Nip. 19830607 200901 1 010



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI KHADIJAH S.Kom.I**
Jabatan : **Pengelola Kepegawaian**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL WAHAB**
Jabatan : **Kasubbag Umum dan Keuangan Barat**
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

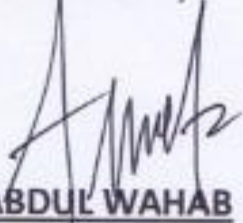
<p>Pihak Kedua,</p>  <p>ABDUL WAHAB Penata Muda TK.I/IIIb NIP.19610210 198602 1 003</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>SITI KHADIJAH, S.Kom.I Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19731230 200701 2 010</p>
---	--



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan usulan Kenaikan Pangkat, usulan Kenaikan Gaji Berkala, usulan Mutasi, usulan Pensiun, Cuti, usulan Penghargaan pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan prosedur yang berlaku. 	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang meliputi usulan Kenaikan Pangkat, usulan Kenaikan Gaji Berkala, usulan Mutasi, usulan Pensiun, Cuti, usulan Penghargaan pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan yang meliputi usulan Kenaikan Pangkat, usulan Kenaikan Gaji Berkala, usulan Mutasi, usulan Pensiun, dan Cuti. 	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan usulan Kenaikan Pangkat, usulan Kenaikan Gaji Berkala, usulan Mutasi, usulan Pensiun, Cuti, usulan Penghargaan pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) . 	1 Dok
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase data yang memenuhi syarat kelengkapan data pegawai 	90 %
	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelola Kepegawaian. 	1 Dok

Pihak Kedua,



ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

NIP.19610210 198602 1 003

Pihak Pertama



SITI KHADIJAH, S.Kom.I

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19731230 200701 2 010



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVIDIANTORO, SE**
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

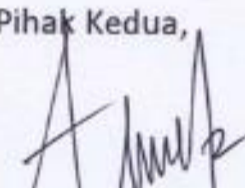
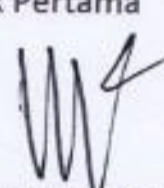
Nama : **ABDUL WAHAB**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Barat
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua,</p>  <p>ABDUL WAHAB Penata Muda TK.I/IIIb NIP.19610210 198602 1 003</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>NOVIDIANTORO, SE Penata Muda /IIIa NIP. 19791102 200901 1 006</p>
---	--



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN INVENTARIS BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none">Mengadministrasikan objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none">Menyusun laporan asset secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none">Persentase asset yang telah dikelola dilingkungan dinas perhubungan	90 %
	<ul style="list-style-type: none">Melaporkan data pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dilingkungan dinas perhubungan	1 Dok

Pihak Kedua,

ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

NIP.19610210 198602 1 003

Pihak Pertama

NOVIDIANORO, SE

Penata Muda /IIIa

NIP. 19791102 200901 1 006



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA DATA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SINGA ARO GULO**
Jabatan : Pengelola Data Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL WAHAB**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Barat
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,

ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

NIP.19610210 198602 1 003

Pihak Pertama

SINGA ARO GULO

Pengatur/IIc

NIP. 197306072006041011



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA DATA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN SESUAI PROSEDUR.	• Menyiapkan bahan Pengadministrasi Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran tugas.	12 Bln
	• Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang telah dikerjakan kepada pelaksana untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pengadministrasi keuangan.	12 Bln
	• Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan dan yang selesai	1 Dok
	• Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Keuangan Per Triwulan	1 Dok
	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengadministrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	2 Dok
	• Melaporkan Dokumen kegiatan pengadministrasi keuangan.	2 Dok

Pihak Kedua,

ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

NIP.19610210 198602 1 003

Pihak Pertama

SINGA ARO GULO

Pengatur/IIc

NIP. 197306072006041011



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
BENDAHARA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD, SE**
Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

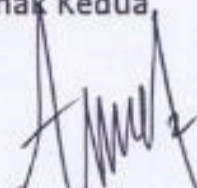
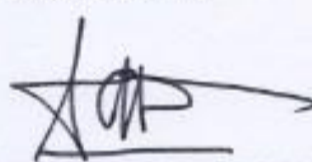
Nama : **ABDUL WAHAB**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Barat
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua</p>  <p>ABDUL WAHAB Penata Muda TK.I/IIIb NIP.19610210 198602 1 003</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>MUHAMMAD ARSYAD, SE Penata Muda/IIIa NIP. 19820725 200901 1 010</p>
--	---



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
BENDAHARA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none">• Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban.	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	12 Bln
	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah laporan SPJ/GU tepat waktu	1 Dok
	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah SPP dan SPM GU dan SPP dan SPM LS yang tepat waktu	2 Dok
	<ul style="list-style-type: none">• Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban.	1 Dok

Pihak Kedua

ABDUL WAHAB

Penata Muda TK.I/IIIb

NIP.19610210 198602 1 003

Pihak Pertama

MUHAMMAD ARSYAD, SE

Penata Muda/IIIa

NIP. 19820725 200901 1 010



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
KEPALA UPT PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASWAD, SE**
Jabatan : **KEPALA UPT PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama

ASWAD, SE
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19770518 200804 1 001



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
KEPALA UPT PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN PADA UPT PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	• Menyusun rencana kegiatan UPTD berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar	12 Bln
	• Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan pada UPTD secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan	1 Dok
	• Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Meningkat 5 % (setiap tahun)
	• Jumlah Sarana dan Prasarna yang terpelihara dengan baik	90%
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPTD kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana Program yang akan datang.	1 Dok

Pihak Kedua,

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama

ASWAD, SE
 Penata Muda Tk.I/IIIb
 NIP. 19770518 200804 1 001



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGAWAS PELABUHAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINAL**
Jabatan : Pengawas Pelabuhan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

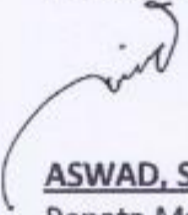

Nama : **ASWAD, SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua,</p>  <p>ASWAD, SE Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19770518 200804 1 001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>ZAINAL Pengatur/IIc NIP. 19800616 200901 1 009</p>
--	--



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGAWAS PELABUHAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN ANGKUTAN DAN KEPELABUHAN	• Mengolah kegiatan penyiapan bahan Peraturan Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pelabuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	12 Bln
	• Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang telah dikerjakan ke Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mensosialisasikan peraturan terkait penyelenggaraan Pelabuhan	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mengumpulkan data pelanggaran di wilayah Pelabuhan	Penurunan Jumlah Kasus Kecelakaan 0 Kasus
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Angkutan dan Pelabuhan	16 Kali
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan Hasil Kegiatan operasional Kepelabuhan kepada kepala UPT Pengelola Sarana Dan Prasarana	1 Dok

Pihak Kedua,

ASWAD, SE

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19770518 200804 1 001

Pihak Pertama

ZAINAL

Pengatur/IIc

NIP. 19800616 200901 1 009



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA DATA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASNAWI**
Jabatan : Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

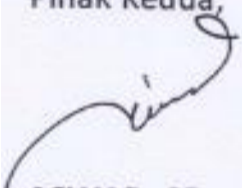
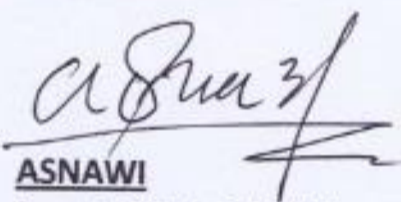
Nama : **ASWAD, SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua,</p>  <p>ASWAD, SE Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19770518 200804 1 001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>ASNAWI Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 1962031 1198603 1 016</p>
--	---

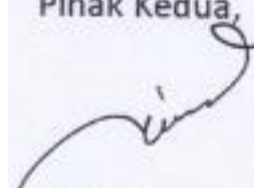
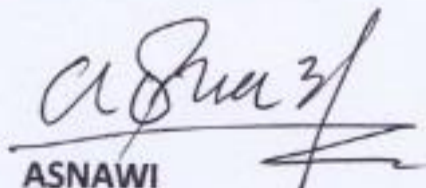


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
 Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA DATA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPELABUHAN	• Menyiapkan Bahan Dokumen teknis operasional Pengelolaan Pelabuhan	12 Bln
	• menyusun Dokumen penataan fasilitas terminal agar tercapai kenyamanan pengguna jasa kendaraan umum	12 Bln
	• Menyiapkan Bahan Permintaan Karcis Retribusi dan Mengelola Kebutuhan dan Distribusi Karcis Retribusi	12 Bln
	• Mengumpulkan Bahan hasil Pemungutan Retribusi dan Menyusun laporan Hasil Pemungutan Retribusi	12 Bln
	• menyusun Dokumen penyelenggaraan kegiatan Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan Kerja Lingkungan di Pelabuhan	1 Dok
	• Memberikan Informasi dengan pihak ketiga yang terkait apabila ada penundaan atau pembatalan pemberangkatan	12 Bln
	• Menyusun Dokumen Operasional Pelabuhan	1 Dok
	• Melakukan Pengawasan operasional pelabuhan seperti mengarahkan angkutan di zona kedatangan dan keberangkatan, mengendalikan lalu lintas di daerah lingkungan kerja Pelabuhan, mengendalikan parkir di area Pelabuhan.	12 Bln
	• Melaporkan Hasil Kegiatan operasional Kepelabuhan kepada kepala UPT Pengelola Sarana Dan Prasarana	1 Dok

<p>Pihak Kedua,</p>  <p>ASWAD, SE Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19770518 200804 1 001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>ASNAWI Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 1962031 1198603 1 016</p>
--	---



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PEGADMINISTRASIAN UMUM KEPELABUHAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL SANI**
Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

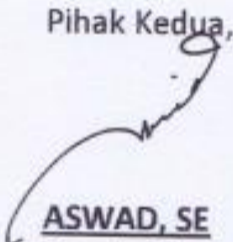
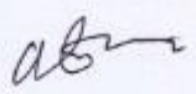
Nama : **ASWAD, SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
	
ASWAD, SE Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19770518 200804 1 001	ABDUL SANI Pengatur Tk.I/IIb NIP. 19651015 200701 1 028



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PEGADMINISTRASIAN UMUM KEPELABUHAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPELABUHAN DAN TERSUSUNNYA LAPORAN ADMINISTRASI PELABUHAN SESUAI PROSEDUR.	• Melakukan pencatatan, penggandaan dan pengarsipan surat-surat dinas	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Menyusun Kegiatan Pengelolaan kerumah tanggaan UPTD	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Memberikan pelayan informasi surat menyurat kedinasan dalam hal pemberkasan maupun pencarian kembali surat-surat sebelumnya	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Menyiapkan kebutuhan ATK dan barang operasional lainnya Lingkup UPTD Terminal	12 Bln
	• menyiapkan Dokumen penyelenggaraan kegiatan Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan Kerja Lingkungan di Pelabuhan	12 Bln
	• Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Operasional Pelabuhan	12 Bln
	• Jumlah laporan Kegiatan Operasional pelabuhan yang tersusun	1 Dok
	• Melaporkan Hasil Kegiatan operasional Kepelabuhan kepada kepala UPT Pengelola Sarana Dan Prasarana	1 Dok

Pihak Kedua,

ASWAD, SE

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19770518 200804 1 001

Pihak Pertama

ABDUL SANI

Pengatur Tk.I/IIb

NIP. 19651015 200701 1 028



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGAWAS TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINAL ABIDIN, SE**
Jabatan : Pengawas Terminal

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

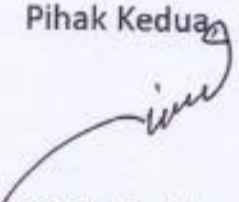
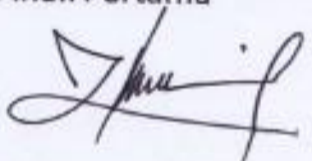
Nama : **ASWAD, SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua</p>  <p><u>ASWAD, SE</u> Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19770518 200804 1 001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p><u>ZAINAL ABIDIN, SE</u> Penata Muda/IIla NIP. 19810908 200604 1 014</p>
--	--



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGAWAS TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN RETRIBUSI DAN TERMINAL	• Mengolah kegiatan penyiapan bahan Peraturan Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan dan Terminal sesuai dengan prosedur yang berlaku.	12 Bln
	• Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang telah dikerjakan ke Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mensosialisasikan peraturan terkait penyelenggaraan terminal	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mengumpulkan data pelanggaran di wilayah Terminal	Penurunan Jumlah Kasus Kecelakaan 50 Kasus
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Angkutan dan Terminal	16 Kali
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan Hasil Kegiatan operasional Kepelabuhan kepada kepala UPT Pengelola Sarana Dan Prasarana	1 Dok

Pihak Kedua

ASWAD, SE

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19770518 200804 1 001

Pihak Pertama

ZAINAL ABIDIN, SE

Penata Muda/IIIa

NIP. 19810908 200604 1 014



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIPIN, ST**
Jabatan : **KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama

ARIPIN, ST
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19800105 201101 1 005



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA TERTIB LAIK KENDARAAN UMUM	• Menyusun rencana kegiatan UPTD berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar	12 Bln
	• Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan pada UPTD secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan	1 Dok
	• Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkat 1 % (setiap tahun)
	• Persentase Kendaraan Yang memenuhi Standar Laik Jalan	Meningkat 26 % (setiap tahun)
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPTD kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana Program yang akan datang.	1 Dok

Pihak Kedua,

Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

Pihak Pertama

ARIPIN, ST
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19800105 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI GUSMANTO, A.Md**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

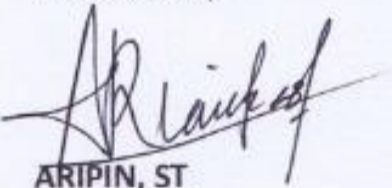
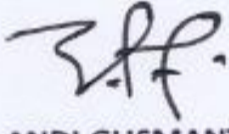
Nama : **ARIPIN, ST**
Jabatan : **Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
	
ARIPIN, ST	ANDI GUSMANTO, A.Md
Penata Muda Tk.I/IIIb	Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19800105 201101 1 005	NIP. 19780805 200604 1 024



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PENGUJIAN	• Menyusun rencana kegiatan UPTD berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar	12 Bln
	• Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing – masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.	12 Bln
	• Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai Juklak dan Juknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	1 Dok
	• Persentase Jumlah Kendaraan Yang Melengkapi Persyaratan Administrasi Pengujian	90 %
	• Persentase Jumlah sarana dan prasana pengujian yang terpelihara	90 %
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Dok

Pihak Kedua,

ARIPIN, ST

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19800105 201101 1 005

Pihak Pertama

ANDI GUSMANTO, A.Md

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19780805 200604 1 024



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGADMINISTRASIAN PENGUJIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANGGA WISNU SAPUTRA**
Jabatan : Pengadministrasian Pengujian

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

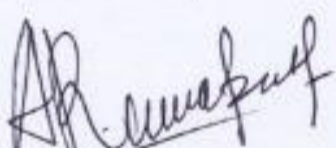
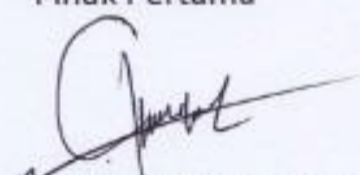
Nama : **ARIPIN, ST**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

<p>Pihak Kedua,</p>  <p>ARIPIN, ST Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 19800105 201101 1 005</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>ANGGA WISNU SAPUTRA Pengatur Muda Tk.I/IIb NIP. 19850625 200604 1 004</p>
---	---



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGADMINISTRASIAN PENGUJIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PENGUJIAN DAN TERSUSUNNYA LAPORAN ADMINISTRASI PENGUJIAN SESUAI PROSEDUR.	• Melakukan pencatatan, penggandaan dan pengarsipan surat-surat dinas	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Menyusun Kegiatan Pengelolaan kerumah tanggaan UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Memberikan pelayan informasi surat menyurat kedinasan dalam hal pemberkasan maupun pencarian kembali surat-surat sebelumnya	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Menyiapkan kebutuhan ATK dan barang operasional lainnya Lingkup UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bln
	• menyiapkan Dokumen penyelenggaraan kegiatan Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan Kerja Lingkungan di Pengujian	12 Bln
	• Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Operasional Pelabuhan	12 Bln
	• Jumlah laporan Kegiatan Operasional pengujian yang tersusun	1 Dok
	• Melaporkan Hasil Kegiatan operasional Kepelabuhan kepada kepala UPT Pengelola Sarana Dan Prasarana	1 Dok

Pihak Kedua,

ARIPIN, ST

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19800105 201101 1 005

Pihak Pertama

WANGGA WISNU SAPUTRA

Pengatur Muda Tk.I/IIb

NIP. 19850625 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RAHARJO, Ama.PKB**
Jabatan : Pengawas Pengujian

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIPIN, ST**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

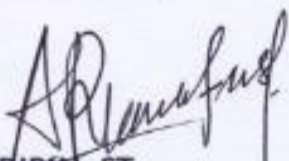
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

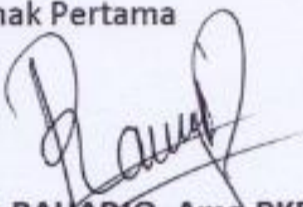
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,


ARIPIN, ST
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19800105 201101 1 005

Pihak Pertama


M. RAHARJO, Ama.PKB
Pengatur/IIc
NIP. 19810808 200801 1 003



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI PROSEDUR	• Menginventarisir peraturan terkait penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bln
	• Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang telah dikerjakan ke Kepala UPT Pengelola Sarana dan Prasarana	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mensosialisasikan peraturan terkait penyelenggaraan terminal	12 Bln
	• Mengawasi kondisi pemenuhan standar Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan Kerja Lingkungan di Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bln
	• Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji Laik Jalan	Meningkat 0,1% (stiap tahunnya)
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Dok

Pihak Kedua,

ARIPIN, ST

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19800105 201101 1 005

Pihak Pertama

M. RAHARJO, Ama.PKB

Pengatur/IIc

NIP. 19810808 200801 1 003



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MUKHLIS**
Jabatan : Pengelola Angkutan Kendaraan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EBTA S. MUHI, ST**
Jabatan : Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua,

EBTA S. MUHI, ST
Penata Muda TK.I/IIId
NIP.19830608 198411 1 001

Pihak Pertama

AHMAD MUKHLIS
Pengatur/IIId
NIP. 19821014 200701 1 008



TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI ANGKUTAN UMUM	• Mengolah kegiatan penyiapan bahan Sistem Pelayanan Angkutan	12 Bln
	• Mengkoordinasikan bahan kegiatan yang telah dikerjakan ke Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12 Bln
	• Melaksanakan kegiatan Pengklasifikasian Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan / Kelengkapan Dokumen Pembuatan Izin Rekomendasi Orang dan Barang	2 Dok
	• Pengumpulan Data pendukung untuk Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan	1 Dok
	• Jumlah Laporan Operasional Terminal Yang Disusun	1 Dok
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Kasi Angkutan dan Pelayanan	1 Dok

Pihak Kedua,

EBTA S. MUHI, ST

Penata Muda TK.I/IIId

NIP.19830608 198411 1 001

Pihak Pertama

AHMAD MUKHLIS

Pengatur/IIId

NIP. 19821014 200701 1 008



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL MUIN**
Jabatan : Pengelola Pengendalian dan Operasional

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

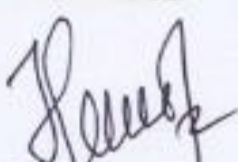

Nama : **HARYADI**
Jabatan : Kasi Operasi Dan Keselamatan Bidang Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 18 Juli 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
HARIYADI	ABDUL MUIN
Penata/IIIc	Juru Tk.I/Id
NIP. 19710404 199003 1 001	NIP. 19740801 200701 1 001



**TABEL. PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
PENGELOLA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MENINGKATNYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN	• Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyidikan pengendalian dan operasional	12 Bln
	• Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan penyidikan pengendalian dan operasional	12 Bln
	• Melakukan penyusunan kinerja terhadap izin penyelenggaraan angkutan barang maupun penumpang yang beroperasi dan pencatatan/pendataan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi	Menurunnya Jumlah kasus Kecelakaan 50 Kasus
	• Melaksanakan Kegiatan Pemanduan Tamu dan Pejabat daerah	1 Dok
	• jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas	30 Kali
	• IKM Terhadap Layanan Masyarakat	78
	• Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Kasi Operasional dan Keselamatan	1 Dok

Pihak Kedua

HARIYADI

Penata/IIIc

NIP. 19710404 199003 1 001

Pihak Pertama

ABDUL MUIN

Juru Tk.I/Id

NIP. 19740801 200701 1 001

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan jasa surat menyurat
: Rp. 1.800.000,00
: 2019
: Terpenuhinya jasa surat menyurat
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	I. PROGRAM PELAYANAN															
	ADMINISTRASI PERKANTORAN															
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1,800,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	1,800,000	100.00	-	
		1,800,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	1,800,000	100.00	-	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
: Rp 81.000.000,-
: 2019
: Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
2	2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja listrik	78,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	77,526,549	99.39	473,451	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas	3,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	2,500,000	83.33	500,000	
		81,000,000								100	100.00	0.00	80,026,549	98.80	973,451	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
: Rp 61.500.000,-
: 2019
: Pemeliharaan Kendaraan Dinas
: Memperlancar Operasional Kegiatan

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
3	3. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	48,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	35,413,900	73.78	12,586,100	
	Belanja premi Asuransi Kecelakaan Kerja	13,500,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	13,050,000	96.67	450,000	
		61,500,000								100	100.00	0.00	48,463,900	78.80	13,036,100	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan jasa administrasi keuangan
: Rp 118.580.000,-
: 2019
: Terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi keuangan
: Meningkatkan fungsi administrasi keuangan penyedia jasa administrasi keuangan

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			Jangka Waktu			Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%			
															13 (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17	
4	PENYEDIAAN JASA ADM. KEUANGAN																
	BELANJA LANGSUNG																
	BELANJA PEGAWAI																
	Honorarium PNS																
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,080,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	111,780,000	94.66	6,300,000		
	Belanja pengadaan	-			-	-	-	-	-								
		118,080,000								100	100.00	0.00	111,780,000	94.66	6,300,000		

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan jasa kebersihan kantor
: Rp 13.547.240,-
: 2019
: terlaksananya jasa kebersihan kantor
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			Jangka Waktu			Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%			
															13 (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17	
5	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR																
	BELANJA LANGSUNG																
	BELANJA BARANG DAN JASA																
	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9,600,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	9,600,000	100.00	-		
	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,947,240			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	3,947,240	100.00	-		
		13,547,240								100	100.00	0.00	13,547,240	100.00	-		

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan alat tulis kantor
: Rp 49.845.780,-
: 2019
: terlaksananya jasa kebersihan kantor
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO	URAIAN KEGIATAN	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			Jangka Waktu			Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%			
															13 (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17	
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR																
	BELANJA LANGSUNG																
	BELANJA BARANG DAN JASA																
	Belanja bahan pakai habis alat tulis kantor	49,845,780			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	48,810,090	97.92	1,035,690		
		49,845,780								100	100.00	0.00	48,810,090	97.92	1,035,690		

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
: Rp. 23.700.000,-
: 2019
: penyediaan administrasi barang cetakan dan pengadaan
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
7	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja cetak	18,700,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	18,700,000	100.00	-	
	Belanja Pengadaan	5,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	4,700,000	94.00	300,000	
		23,700,000								100	100.00	0.00	23,400,000	98.73	300,000	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
: Rp 7.611.200,-
: 2019
: Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan kantor
: Pelayanan administrasi perkantoran berjalan

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
8	PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	7,611,200			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	7,611,200	100.00	-	
		7,611,200								100	100.00	0.00	7,611,200	100.00	-	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
: Rp 6.000.000,-
: 2019
: Pelayanan administrasi perkantoran
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
9	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja surat kabar / majalah	6,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	6,000,000	100.00	-	
		6,000,000								100	100.00	0.00	6,000,000	100.00	-	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Penyediaan makanan dan minuman
: Rp 4.200.000,-
: 2019
: Tersedianya makanan dan minuman
: Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja makan dan minum rapat	4,200,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	2,700,000	64.29	1,500,000	
		4,200,000								100	100.00	0.00	2,700,000	64.29	1,500,000	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
: Rp 294.378.000,-
: 2019
: Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
: Pelayanan kinerja

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
11	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	54,101,373	98.37	898,627	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	239,378,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	239,062,736	99.87	315,264	
		294,378,000								100	100.00	0.00	293,164,109	99.59	1,213,891	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Pengadaan Peralatan gedung kantor
: Rp63,000,000
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor pelaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR															
12	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR															
	KANTOR															
	Belanja modal pengadaan Printer	15,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	14,850,000	99.00	150,000	
	Belanja modal pengadaan laptop	20,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	19,844,000	99.22	156,000	
	belanja modal pengadaan mesin absensi	20,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	19,167,000	95.84	833,000	
	belanja modal pengadaan KURSI KERJA	8,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	7,964,000	99.55	36,000	
					-	-	-	-	-						-	
					-	-	-	-	-						-	
					-	-	-	-	-						-	
					-	-	-	-	-						-	
		63,000,000								100	100.00	0.00	61,825,000	98.13	1,175,000	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor
: Rp56,000,000.00
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor pelaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
13	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor															
	honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	9,600,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	9,600,000	100.00	-	
	belanja pemeliharaan gedung/bangunan	46,500,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	46,363,000	99.71	137,000	
					-	-	-	-	-						-	
					-	-	-	-	-						-	
		56,100,000								100	100.00	0.00	55,963,000	99.76	137,000	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
: Rp 417.440.000,-
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor pelaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
14	pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional															
	honorarium pegawai honorer/tidak tetap	79,200,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	79,200,000	100.00	-	
	belanja jasa service	22,650,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	17,147,800	75.71	5,502,200	
	belanja penggantian suku cadang	114,110,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	110,722,147	97.03	3,387,853	
	belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	183,830,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	183,805,677	99.99	24,323	
	belanja surat tanda nomor kendaraan	17,650,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	17,650,000	100.00	-	
		417,440,000								100	100.00	0.00	408,525,624	97.86	8,914,376	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor
: Rp 58.550.000,-
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN				PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket	
					L/PL/PML/SW	Kontraktor pelaksana (PT/C)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
15	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor															
	belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan	40,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	39,928,909	99.82	71,091	
	lalu lintas															
	belanja pemeliharaan komputer/laptop/printer	9,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	8,804,136	97.82	195,864	
	belanja pemeliharaan air conditioner/kipas	4,550,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	4,515,750	99.25	34,250	
	belanja pemeliharaan generator/genset	4,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	2,982,273	74.56	1,017,727	
	belanja pemeliharaan mesin pompa air	1,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	985,000	98.50	15,000	
		58,550,000								100	100.00	0.00	57,216,068	97.72	1,333,932	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: peningkatan disiplin aparatur
: Rp 62.500.000,-
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN				PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket	
					L/PL/PML/SW	Kontraktor pelaksana (PT/C)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
16	program peningkatan disiplin aparatur															
	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	62,500,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	62,150,000	99.44	350,000	
		62,500,000								100	100.00	0.00	62,150,000	99.44	350,000	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Peyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
: Rp 19.800.000,-
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor blaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
17	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN															
	honorarium pegawai honor/tidak tetap	15,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	14,900,000	99.33	100,000	
	belanja cetak	4,800,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	4,800,000	100.00	-	
		19.800.000								100	100.00	0.00	19.700.000	99.49	100.000	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: rehabilitasi /pemeliharaan terminal /pelabuhan
: Rp 150.420.000,-
: 2019
:
:

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor blaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
18	PROGRAM REHABILITASI dan PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ rehabilitasi/pemeliharaan/terminal/pelabuhan															
	- Belanja Pemeliharaan gedung/bangunan	150,420,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	150,109,000	99.79	311,000	
		150.420.000								100	100.00	0.00	150.109.000	99.79	311.000	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: KEGIATAN PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL
: Rp 529.800.000,-
: 2019
: Meningkatnya Disiplin awak kendaraan umum
: Meningkatnya Pelayanan

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor blaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
19	6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI															
	Honorarium PNS															
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/honoror	432,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	430,200,000	99.58	1,800,000	
	belanja jasa kerja	97,800,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	95,490,000	97.64	2,310,000	
		529.800.000								100	100.00	0.00	525.690.000	99.22	4.110.000	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: POSKO PENGAMANAN HARI HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH
: Rp 175.000.000,-
: 2019
: Tercapainya Ketertiban Pelayanan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru
: Meningkatnya Pengamanan Ramadhan, Angkutan Lebaran, Tahun Baru

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/PML/SW	Kontraktor pelaksana (PT/C	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN															
20	POSKO PENGAMANAN HARI HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA BARANG DAN JASA															
	Belanja Jasa Pengawasan dan Pengamanan	163,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	154,667,000	94.89	8,333,000	
	belanja jasa keagamaan	12,000,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	12,000,000	100.00	-	
	<i>Jumlah</i>	175,000,000								100	100.00	0.00	166,667,000	95.24	8,333,000	
	<i>Total 20 (dua puluh) kegiatan</i>	2,138,172,220								100	100.00	0.00	2,145,148,780	100.33	(6,976,560)	

Diketahui oleh,
KEPALA DINAS

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

SYAMSUL JAUHARI. S.Sos
NIP. 19701223 199203 1 001

ALMARDI,SE
NIP. 196550326 199303 1 003

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
: Rp ,-
: 2019
: terlaksananya pengujian kendaraan bermotor
: tertibnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	jangka waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN															
	KENDARAAN BERMOTOR															
1.	UJI KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR															
	BELANJA CETAK					-	-	-	-							-
		-											-			-

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
: Rp 13.200.000,-
: 2019
: Terlaksananya rapat-rapat pembahasan Forum LLAJ
: Terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan LLAJ

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket		
					L/PL/PML/SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	jangka waktu		Realisasi Fisik					Daya serap Keuangan	
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %			(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
1	SOSIALISASI / PENYULUHAN KETERTIBAN															
	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN															
	BELANJA LANGSUNG															
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	10,000,000			-	-		-	-	100	100.00	0.00	10,000,000	100.00	-	
	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000			-	-		-	-	100	100.00	0.00	3,000,000	100.00	-	
	Belanja cetak	200,000								100	100.00	0.00	200,000	100.00	-	
		13,200,000								100	100.00	0.00	13,200,000	100.00		

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Operasional Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
: Rp 500.060.000,-
: 2019
: terlaksananya pengawasan ,pengamanan dan pengawalan LLAD
: meningkatnya keamanan kenyamanan dan keselamatan LLAD

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN				PERKEMBANGAN PELAKSANAAN						Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	jangka waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14-3) x 100	16 (3-14)	17
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN															
	LALU LINTAS															
	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas															
	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	313,200,000			-	-		-	-	100	100.00	0.00	313,200,000	100.00	-	
	Belanja Jasa Pengawalan dan pengamanan	186,860,000			-	-		-	-	100	100.00	0.00	176,961,000	94.70	9,899,000	
	Jumlah 2 (DUA) kegiatan	500.060.000								100	100.00	0.00	490.161.000	98.02	9.899.000	
		513,260,000								100	100.00	0.00	503,361,000	98.07	9,899,000	

Diketahui oleh,
KEPALA DINAS

SYAMSUL JAUHARI.S.Sos
NIP. 19701223 199203 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

JUNADI TANJUNG S.sos.i
NIP. 19670622 198903 1003

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut,Sungai dan Penyeberangan
: Rp 188.700.000,-
: 2019
: Terciptanya ketertiban pelayanan angkutan laut dan sungai
: Meningkatkan ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut dan sungai

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN															
1	PENGAWASAN KAWASAN PELABUHAN LAUT SUNGAI DAN PENYEBERANGAN															
	BELANJA LANGSUNG															
	BELANJA PEGAWAI															
	HONORARIUM NON PNS															
	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak tetap	140,400,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	140,400,000	100.00	-	
	Belanja Jasa pengawalan dan pengamanan	48,300,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	46,860,000	97.02	1,440,000	
		188,700,000								100	100.00	0.00	187,260,000	99.24	1,440,000	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Kegiatan penciptaan Keamanan dan kenyamanan Penumpang dilingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan.
: Rp 154.290.000,-
: 2019
: pengamanan berjalan dengan baik
: terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang pelabuhan sungai dan penyeberangan

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN							Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN															
2	kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan															
	Belanja Jasa Kerja pengawalan dan pengamanan	154,290,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	145,265,000	94.15	9,025,000	
	Belanja cetak				-	-	-	-	-							
		154,290,000								100	100.00	0.00	145,265,000	94.15	9,025,000	

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

DINAS / INSTANSI / SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
JUMLAH DANA DPA
TAHUN ANGGARAN
SASARAN
MANFAAT

: Dinas Perhubungan
: Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan
: Rp 150.420.000,-
: 2019
: Terciptanya ketertiban pelayanan angkutan laut dan sungai
: Meningkatnya ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut dan sungai

NO.	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA	Volume	Lokasi	PELAKSANAAN KEGIATAN					PERKEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					L/PL/ PML/ SW	Kontraktor Pelaksana (PT/CV)	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu		Realisasi Fisik			Daya serap Keuangan			
								mulai	selesai	target %	rea %	dev %	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)	14	15 (14:3) x 100	16 (3-14)	17
	1. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMLIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ															
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan terminal / Pelabuhan - Belanja modal pemeliharaan dermaga	150,420,000			-	-	-	-	-	100	100.00	0.00	150,109,000	99.79	311,000	
		150,420,000								100	100.00	0.00	150,109,000	99.79	311,000	
	<i>Jumlah</i>	150,420,000								100	100.00	0.00	150,109,000	99.79	311,000	
	Jumlah 3 (tiga) kegiatan	493,410,000								100	100.00	0.00	150,109,000	30.42	343,301,000	

Diketahui oleh,
KEPALA DINAS

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

SYAMSUL JAUHARI, S.Sos
NIP. 19701223 199203 1 001

AGUS SUSIAWAN, S.pd
NIP. 19680806 198903 1 005

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
(POSISI : BULAN DESEMBER TAHUN 2019)**

NO	UNIT KERJA/NAMA PROGRAM/URAIAN KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN (RP)
			APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK %	
						Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. PROGRAM PELAYANAN ADM.PERKANTORAN		666,334,220	118,928,000	661,662,220	637,303,088	96.32	100.00	24,359,132
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Sda	4,500,000	2,700,000	1,800,000	1,800,000	40.00	100.00	-
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Sda	136,000,000	55,000,000	81,000,000	80,026,549	58.84	100.00	973,451
3	PENYEDIAAN JASA JAMINAN MILIK DAERAH	Sda	61,500,000		61,500,000	48,463,900	78.80	100.00	13,036,100
4	PENYEDIAAN JASA ADM.KEUANGAN	Sda	118,580,000	500,000	118,080,000	111,780,000	94.27	100.00	6,300,000
5	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Sda	13,547,240		13,547,240	13,547,240	100.00	100.00	-
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Sda	49,845,780		49,845,780	48,810,090	97.92	100.00	1,035,690
7	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Sda	27,550,000	3,850,000	23,700,000	23,400,000	84.94	100.00	300,000
8	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN	Sda	4,611,200	3,000,000	7,611,200	7,611,200	165.06	100.00	-
9	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sda	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	-
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Sda	4,200,000		4,200,000	2,700,000	64.29	100.00	1,500,000
11	RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Sda	240,000,000	54,378,000	294,378,000	293,164,109	122.15	100.00	1,213,891
	2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		577,330,000	109,240,000	595,090,000	583,529,692.00	98.06	100.00	11,560,308
12	PENGADAAN PERALATAN GENDUNG KANTOR	Sda	55,000,000	8,000,000	63,000,000	61,825,000	112.41	100.00	1,175,000
13	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Sda	19,600,000	36,500,000	56,100,000	55,963,000	285.53	100.00	137,000
14	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Sda	463,180,000	45,740,000	417,440,000	408,525,624	88.20	100.00	8,914,376
15	PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	Sda	39,550,000	19,000,000	58,550,000	57,216,068	144.67	100.00	1,333,932
	3.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		62,500,000	0	62,500,000	62,150,000	99.44	100.00	350,000
16	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANYA	Sda	62,500,000	0	62,500,000	62,150,000	99.44	100.00	350,000
	4.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		18,300,000	1,500,000	19,800,000	19,700,000	99.49	100.00	100,000
17	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Sda	18,300,000	1,500,000	19,800,000	19,700,000	107.65	100.00	100,000

NO	UNIT KERJA/NAMA PROGRAM/URAIAN KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN (RP)
			APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK %	
						Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ		58,768,000	91,652,000	150,420,000	150,109,000	255.43	100.00	311,000
18	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	Sda	58,768,000	91,652,000	150,420,000	150,109,000	255.43	100.00	311,000

NO	UNIT KERJA/NAMA PROGRAM/URAIAN KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN (RP)
			APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK %	
						Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		1,062,670,000	1,680,000	1,060,990,000	1,038,082,000	97.69	100.00	22,908,000
19	PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DILINGKUNGAN TERMINAL	Sda	530,280,000	480,000	529,800,000	525,690,000	99.22	100.00	4,110,000
20	PENGAWASAN KAWASAN PELABUHAN LAUT DAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	Sda	188,700,000	-	188,700,000	187,260,000	99.24	100.00	1,440,000
21	POSKO PENGAMANAN HARI HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH	Sda	175,000,000	-	175,000,000	166,667,000	95.24	100.00	8,333,000
22	FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Sda	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	100.00	100.00	-
23	KEGIATAN PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DILINGKUNGAN PELABUHAN SUNGAI DAN PELABUHAN PENYEBRANGAN	Sda	155,490,000	1,200,000	154,290,000	145,265,000	94.15	100.00	9,025,000

NO	UNIT KERJA/NAMA PROGRAM/URAIAN KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN (RP)
			APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK %	
						Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		535,820,000	35,760,000	500,060,000	490,161,000	98.02	100.00	9,899,000
24	OPERASIONAL PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Sda	535,820,000	35,760,000	500,060,000	490,161,000	98.02	100.00	9,899,000
JUMLAH TOTAL (DINAS PERHUBUNGAN) 7 PROGRAM 24 KEGIATAN			2,981,722,220	(68,800,000)	3,050,522,220	2,981,034,780	97.72	100.00	69,487,440

Kuala Tungkal, Desember 2019
Mengetahui,

KEPALA DINAS

SYAMSUL JAUHARI. S.Sos
NIP. 19701223 199203 1 001

2478813168